

**DINAMIKA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI PENGADILAN AGAMA DONGGALA**



**Tesis**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister dalam Bidang Hukum Islam pada  
Program Pascasarjana UIN Alauddin  
Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**MUH. SALEH SANGAJI**  
NIM. 80100210138

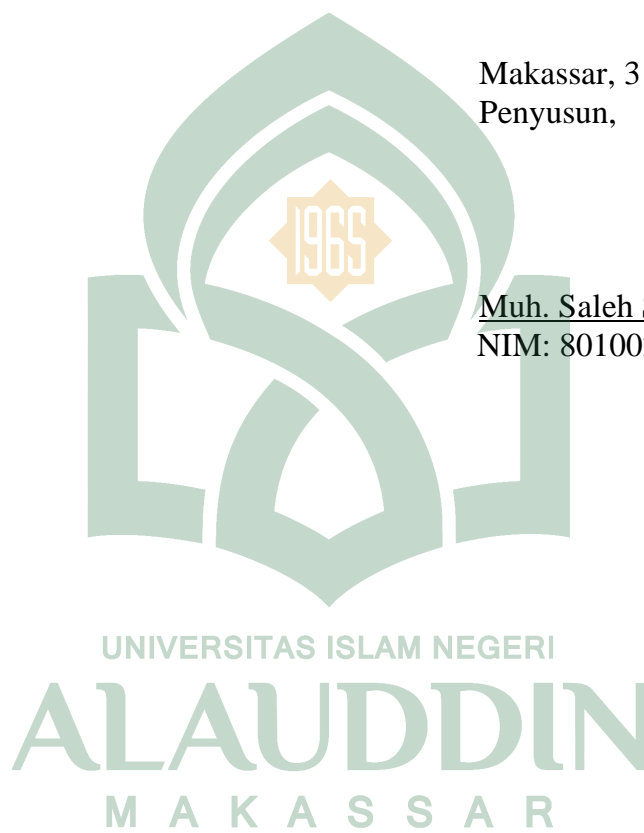
**PROGRAM PASCASARJANA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Mei 2013  
Penyusun,

Muh. Saleh Sangaji  
NIM: 80100210138



## PERSETUJUAN PROMOTOR DAN PENGUJI

Tesis dengan judul “Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala” yang disusun oleh saudara **Muh. Saleh Sangaji**, NIM: 80100210138, telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Penelitian Tesis yang diselenggarakan pada hari Jumat, 05 Juli 2013 memandang bahwa tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh Ujian Munaqasyah Tesis.

### PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Baso Midong, M.A. (.....)

### KOPROMOTOR:

2. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag. (.....)

### PENGUJI:

1. Prof. Dr. Ali Parman (.....)

2. Prof. Dr. Darussalam (.....)

3. Prof. Dr. H. Baso Midong, M.A. (.....)

4. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag. (.....)

Makassar, Agustus 2013  
Diketahui oleh:  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar,

**Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.**  
NIP. 19540816 198303 1 004

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي ارسل رسوله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم  
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah swt., atas rahmat, *inayah* dan hidayah-Nya jualah sehingga penulisan tesis yang berjudul “Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala” dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw., keluarga, dan para sahabatnya.

Dalam merampungkan tesis ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami oleh penulis, namun berkat *ikhtiyar* dan karunia Allah swt., serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Olehnya itu, dengan segala kerendahan hati, penulis merasa berkewajiban untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing HT, M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, dan para Pembantu Rektor.
2. Prof. Dr. H. Natsir Mahmud, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Baso Midong, M.A., selaku Asisten Direktur I, dan Prof. Dr. H. Nasir A Baki, M.A., selaku Asisten Direktur II, serta Dr. Muljono Damopolii, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah pada Program Strata Dua (S2), yang telah menyediakan fasilitas, memberikan arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Prof. Dr. H. Baso Midong, M.A., sebagai Promotor I dan Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag., sebagai Promotor II, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, dan memotivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Prof. Dr. Ali Parman sebagai Penguji I dan Prof. Dr. Darussalam sebagai Penguji II, yang telah mengoreksi tesis ini dengan saksama untuk mendapatkan kesempurnaann.
5. Ketua Pengadilan Agama Donggala beserta seluruh Unsur yang terkait di Intansi Pengadilan Agama Donggala yang telah banyak memberikan informasi dan telah meluangkan waktunya kepada penulis.
6. Segenap dosen yang telah membina penulis dan seluruh staf administrasi di program pasca UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah dan beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, terkhusus rekan-rekan konsentrasi Hukum Islam angkatan 2010, atas kebaikannya, memberikan motivasi, doa, dan sumbangan pemikiran selama penulis menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
9. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi serta menyumbangkan pemikiran kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, dan segala partisipasi semua pihak semoga memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Makassar, Juni 2013  
Penyusun,

**Muh. Saleh Sangaji**  
NIM: 80100210138

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR DAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	13
C. Definisi Operasional dan Fokus Penelitian .....	14
D. Kajian Pustaka .....	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
F. Garis Besar Isi Tesis.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	21
B. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga...	28
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
D. Faktor Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	40
E. Dampak Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	55
F. Kerangka Fikir .....	61
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	66
B. Rancangan Penelitian .....	68
C. Lokasi Penelitian .....	69
D. Sumber Data Penelitian.....	70
E. Instrumen Penelitian.....	71
F. Teknik Pengolahan Data .....	72
G. Pengujian Keabsahan Data .....	75
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	77
B. Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Donggala .....	88
C. Azaz Yang Mendasari Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Implikasi .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>120</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	za	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sa	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	da	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
اَ	<i>fathḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathḥah dan ya&gt;</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوْلَ : *hau-la*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
اَ...   اِ...	<i>fathḥah dan alif</i> atau	a>	a dan garis di
اِيْ	<i>kasrah dan ya&gt;</i>	i>	i dan garis di
اُوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	u>	u dan garis di

Contoh:

مَاتَ : *mata*  
رَمَى : *rama>*  
قِيلَ : *qila*  
يَمُوتُ : *yamutu*



#### 4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudh al-atfal*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*  
الْحَكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ˆ* *syadd* ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*  
نَجِّنَا : *najjaina*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
نُعَم : *nu'ima*  
عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i>

Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruṭa*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilbab al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. Lafz}al-Jalabah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billah* دِينَ الله *dinullah*

Adapun *ta>marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz}al-jalabah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللهِ *fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma ~~Muhammadun~~ illa ~~rasul~~*  
*Inna awwala baitin wudj'a linnasi lallaz ~~i~~bi Bakkata mubarakan*  
*Syahru Ramadhan al-laz ~~i~~anzila fih al-Qur'an*  
Nas ~~j~~ al-Din al-T ~~isi~~>  
Abu ~~Nas~~ al-Farabi>  
Al-Gazali>  
Al-Munqiz \min al-D ~~al~~>

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

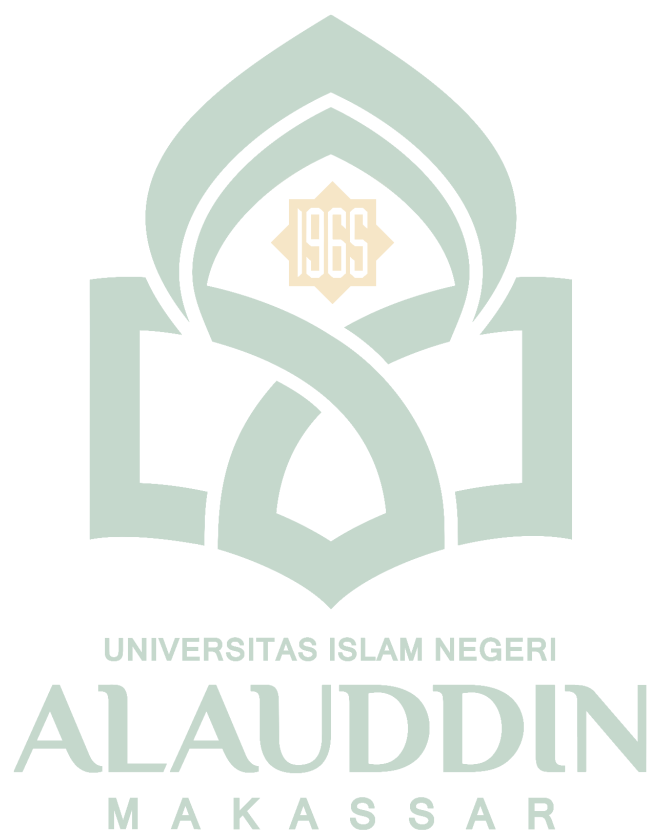
Abu>al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu>al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu>al-Walid Muhammad Ibnu)  
Nas ~~j~~ Hamid Abu>Zaid, ditulis menjadi: Abu>Zaid, Nas ~~j~~ Hamid (bukan: Zaid, Nas ~~j~~ Hamid Abu>)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subh ~~an~~ahu wa ta'ala*>  
saw. = *s ~~all~~allahu 'alaihi wa sallam*  
a.s. = *'alaihi al-salam*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al-‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Muh. Saleh Sangaji**  
**NIM : 80100210138**  
**Judul Skripsi : “Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala”**

---

Tesis ini membahas “Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala, dan Apa yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Mengakibatkan Perceraian serta Bagaimanabentuk Penyelesaian perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala?

Peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Donggala dengan teknik pengumpulan data riset lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif dan Yuridis.

Hasil penelitian ini adalah penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Donggala yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental serta dihukum serta Adapun bentuk penyelesaian perkara penyebab perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala yaitu dengan berprinsip dengan asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, Asas sederhana, cepat dan biaya ringan; asas persidangan untuk umum, asas legalitas, asas persamaan serta asas aktif memberi bantuan.

Implikasi dari penelitian ini: 1) kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian yang berkenaan dengan KDRT karena masih terbuka peluang yang cukup besar untuk melakukan penelitian lanjutan. 2) Hendaknya kepada para pasangan suami istri untuk lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, serta selalu berusaha untuk menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya; 3) Kepada para Hakim Pengadilan Agama untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap berbagai disiplin Ilmu Hukum dan juga beberapa disiplin ilmu lainnya, misalnya disiplin Ilmu Psikologi. Hal ini diperlukan guna menjadikan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim lebih kuat, berbobot, dan berkualitas.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak dapat disangkal oleh setiap individu. Perkawinan adalah sebagai sarana memenuhi kecenderungan untuk menjalankan hasrat biologis dan psikologis kemanusiaan serta bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan berbagi kasih sayang dan juga karena menginginkan adanya ketentraman yang secara alamiah (*sunnatullah*) telah ditentukan oleh Allah sebagai manifestasi untuk melangsungkan proses kehidupan di dunia ini.

Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Islam hal ini disinyalir dalam Q.S. al-Rum/30:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

‘dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), h. 572

Tujuan dari perkawinan yang diatur dalam tata nilai kemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari tata nilai keagamaan seseorang, yang mana secara universal tata nilai keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan dapat dikatakan sama disemua agama dan keyakinan.

Sementara dalam ajaran Islam, bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>2</sup>

Tatanan nilai yang diterapkan dalam perkawinan khususnya yang diatur di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan K. Bertens bahwa 'agama adalah motivasi yang terkuat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, apalagi yang berhubungan dengan hal yang sangat prinsipil dalam aturan masing-masing agama',<sup>3</sup> walaupun pada kenyataannya aturan itu sendiri terkadang tidak diindahkan oleh umat beragama yang bersangkutan pada beberapa aspek penerapannya secara umum.

Islam sebagai sebuah agama, menurut doktrin ajarannya tidak dapat pula memisahkan diri dalam persoalan kehidupan, karena agama itu sendiri ada, ditujukan agar memberikan petunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang baik atau memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak baik, walaupun nantinya akan berseberangan dengan doktrin dari kepercayaan dan agama lainnya. Dengan

---

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998), h. 56

<sup>3</sup>K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 35

demikian, pelaksanaan perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, sangat sejalan dengan aturan agama dan sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, yang terdapat pada Pasal 1 yaitu: 'Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.<sup>4</sup>

Pernyataan ini dapat dilihat pula dari komentar Ibrahim Hosen yang mengatakan bahwa nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan Allah yaitu untuk memakmurkan dunia ini dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia, sehingga perkawinan dibutuhkan untuk dapat mengatur dan sebagai wadah penyaluran potensi kemanusiaannya, dan untuk menjamin keteraturan tersebut maka mesti diikuti dengan ketundukan pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa Undang-Undang perkawinan tersebut menganut prinsip asas monogami.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan ayat Alquran yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

---

<sup>4</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>5</sup>Ibrahim Hoesein, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalak, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, (Cet. I, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), h. 77

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 57



Terjemahnya:

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>7</sup>

Undang-Undang ini mengatur pula hak dan kedudukan antara suami dan isteri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.<sup>8</sup>

Dalam perkawinan tidak semua pasangan dapat menjalani hubungan berumah tangga dengan baik dan mendapatkan ketenangan dari pasangannya masing-masing. Terkadang perkawinan itu harus menempuh kerikil tajam yang dapat membuat hubungan suami isteri tersebut menjadi tidak harmonis adanya, namun terkadang pula ada yang dapat melewati rintangan dan permasalahan dalam rumah tangga dengan cara yang telah disepakati sebelumnya ketika awal mereka membangun rumah tangga atau dengan cara terjadi saling pengertian diantara mereka, sehingga tidak harus permasalahan itu berlanjut kepada ketidakharmonisan mereka bahkan sampai pada hasil kesimpulan untuk berpisah atau bercerai.

Sebelum menempuh jalan perceraian Islam memberikan solusi terhadap penyelesaian perkara rumah tangga dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Q.S. an-Nisa/4:35 yaitu:

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 99

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *loc. cit.*

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>9</sup>

Dalam ayat diatas Allah memberikan solusi sebelum menempuh jalan perceraian melalui pengadilan yaitu jika terjadi permasalahan pada suami dan isteri sebaiknya mereka atau pihak keluarga mengupayakan menghadirkan pihak yang dapat berposisi netral dari kedua belah pihak untuk dapat mendamaikan sekaligus mencari solusi bagi masalah yang mereka alami sehingga kemudian mereka dapat membina dan melanjutkan hubungan keluarga yang lebih harmonis.

Dalam Islam perceraian adalah sesuatu yang dijadikan jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan hubungan perkawinan tersebut. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Rasulullah mengatakan bahwa “Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah talak (perceraian)”.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Rofiq bahwa salah satu prinsip mendasar dari syariat perkawinan Islam adalah asas mempersulit terjadinya perceraian.<sup>11</sup>

Dalam aplikasinya, asas mempersulit terjadinya perceraian dilaksanakan

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 109

<sup>10</sup>*Subul Al-Salam*, Juz 3 (Qairo: Dar Ihya Alturas Alaraby, 1960), h. 168

<sup>11</sup>Ahmad Rofiq, *loc. cit.*

sebagai jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan mahligai rumah tangga. Sehingga prosedur dan tata laksana di pengadilan pun tergambar bahwa niat untuk bercerai itu terlaksana ketika semua proses persidangan sudah melalui jalan buntu untuk berdamai.

Walaupun asas ini diterapkan dijadikan asas untuk mencegah terjadinya perceraian, tetapi ada pula perceraian yang dilaksanakan di pengadilan harus dilanjutkan dengan putusan untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara suami isteri tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk menyatukan mereka lagi.

Salah satu faktor yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan adalah karena adanya indikasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya atau pihak isteri kepada suaminya, walaupun yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya sehingga sang isteri mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Dalam Islam kekerasan dalam bentuk apapun yang berimplikasi kepada kezaliman (penganiayaan) tidak dibolehkan, apalagi yang terjadi di dalam rumah tangga setiap keluarga muslim. Rumah tangga muslim semestinya menghantarkan setiap individu yang ada di dalamnya harusnya mendapatkan ketenangan hidup sehingga tujuan membina rumah tangga agar menjadi mawaddah dan rahmah dalam syariat Islam dapat terpenuhi, namun hal itu kerap kali terjadi di dalam keluarga yang jauh dari nilai-nilai Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebutkan di atas, juga dapat dinilai mengandung unsur kejahatan, walaupun itu dilakukan kepada isteri atau bahkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Islam sangat tidak mentolelir berbagai bentuk kekerasan yang terjadi apalagi dilakukan dalam rumah tangga.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga.

Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab malapetaka, penganiayaan, perkosaan bahkan pembunuhan justru sering terjadi di antara anggota keluarga itu sendiri.<sup>12</sup>

Kekerasan Terhadap Perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Kekerasan tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kekerasan.

---

<sup>12</sup>G. Widiartana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), h. 1

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara psikologis, fisik dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Bentuk pemerkosaan atas nama ikatan perkawinan atau pada posisi seorang pelaku yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual dimana pada saat itu korban tidak menghendakinya adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya bukan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau di tutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus, yakni terletak pada hubungan antara pelaku dan korban .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan “ Payung Hukum “ bagi para korban. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 ayat(1) yang maksud adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>13</sup>

Kekerasan rumah tangga yang terjadi dan menjadi fakta dalam masyarakat saat ini sangat berdampak pada semua aspek keluarga. Sehingga ada beberapa anak yang menjadi korban atas KDRT yang dilakukan oleh orang tuanya (Ayah) kepada ibunya, dan ini sangat mempengaruhi mental dan psikologinya di masyarakat.

Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa suatu keluarga hanyalah untuk melindungi nama baik keluarga. Pengorbanan sang isteri seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Banyaknya kasus yang terjadi khususnya KDRT, akan membuat begitu banyak pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan pula tingkat penyelesaian yang optimal oleh pengadilan agama terhadap penyelesaian kasus KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi disemua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi, menengah maupun bawah. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja baik itu perempuan maupun laki-laki dan tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan dan anak-anak. Sejauh ini penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya, negara dilarang campur tangan ke ranah domestik warganegaranya. Seberat apa pun penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah tangga itu pula yang berhak menentukan untuk menyelesaikannya

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1

atau tidak.

Dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan matinya korban. Budaya masyarakat yang menstigma bahwa pertengkaran, kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat, secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dan anak pada kelompok masyarakat rentan, ketidakberdayaan mereka semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk.

Fakta di lapangan cenderung menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut terjadi akibat fisik mereka yang lemah dan ketergantungan mereka terhadap ayah atau suami mereka.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi karena secara umum dalam konstruksi sosial perempuan mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga mereka lebih rentan dalam menghadapi ketidakadilan, kesewenangan maupun kekerasan. Selain itu dalam masyarakat ada kecenderungan pemikiran bahwa suami berhak atas isteri sehingga jika isteri bersalah ia mempunyai hak untuk memukulinya.

Dalam kehidupan di masyarakat terdapat kenyataan bahwa keutuhan rumah tangga sering terancam eksistensinya akibat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu yang merasa paling dominan dan berkuasa

dalam hal ini banyak pelakunya adalah kaum laki-laki (suami) dengan korban kebanyakan berasal dari kaum perempuan (isteri).

Kekerasan yang terjadi berawal dari kurang kadar kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada isteri dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan jalan memisahkan kedua belah pihak baik dengan secara dicarikan penengah yang dapat menasehati kedua belah pihak atau salah satu pihak yang melakukan tindak kekerasan atau dengan jalan terakhir dengan cara dipisahkan untuk selamanya dalam artian bercerai melalui pengadilan agama.

Pengadilan agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari pengadilan agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun Pengadilan Agama tidak mengadili tindak pidananya, pengadilan agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi.

Data pasangan melakukan perceraian di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan, fenomena maraknya perceraian dalam rumah tangga di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat angka perceraian memperlihatkan *trend* yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, sedikitnya



200.000, bahkan 2 tahun kemudian, yakni data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama seluruh Indonesia sebanyak 258.069 perkara, di mana perkara cerai talak berjumlah 86.592 perkara, sedangkan cerai gugat berjumlah 171.477 perkara.

Komnas Perempuan dalam sekapur sirih yang ditulisnya dalam buku “Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga” menyebutkan: Dari tahun ke tahun, Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama adalah sangat signifikan. Kompilasi data yang dilakukan Komnas Perempuan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2007, jumlah kasus yang ditangani oleh 43 Pengadilan Agama mencapai 8.555 kasus. Ini merupakan 33,5% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat ditangani.

Dengan kata lain dari 25.522 kasus dimana korban datang langsung untuk mengurus sendiri penanganannya, hampir 60% melakukannya di Pengadilan Agama. Artinya, perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama dan para hakimnya untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.

Kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama ‘tersembunyi’ dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para isteri. Alasan isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami – suatu tindakan yang menurut UU Penghapusan KDRT merupakan salah satu

bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan paham bahwa meningkatnya perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun.

Di Indonesia Intensitas kekerasan pada perempuan Indonesia dinilai sangat tinggi, buktinya dari penduduk Indonesia berjumlah 217 juta, 11,4% diantaranya atau sekitar 24 juta perempuan terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh.

Berangkat dari latar belakang diatas maka menurut penulis, penelitian ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat, agar dapat memberikan informasi bahkan menjadi pedoman yang ingin mengetahui sejauh mana penyelesaian perkara di pengadilan agama khususnya kasus KDRT. Olehnya itu penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Donggala”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berawal dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala?

Untuk mempertajam pokok masalah dalam penelitian ini, maka dijabarkan kedalam sub masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga mengakibatkan perceraian?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **1. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan agar penulis dapat memberikan pemetaan dari pembahasan yang berkaitan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Dalam tesis ini judul yang diangkat adalah: “Dinamika Penyelesaian Perceraian Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala”.

- a. Dinamika penyelesaian perkara adalah perubahan dan upaya untuk menuntaskan sesuatu atau persoalan/masalah dalam proses peradilan.
- b. Perceraian adalah upaya atau perbuatan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami isteri.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- d. Pengadilan Agama Donggala adalah tempat yang dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara perdata baik hukum keluarga, waris, zakat, infak dan

shadaqah secara formil khusus bagi umat Islam di Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini Pengadilan agama Donggala adalah sebagai lokasi penelitian. Hal ini diambil disebabkan besarnya lingkup perkara perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama di Indonesia khususnya di Donggala, sehingga lebih spesifik peneliti hanya menfokuskannya pada perkara perceraian yang berkenaan dengan adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga.

## D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga telah terdapat tulisan terdahulu yaitu tulisan Intan Wijayanti, 3450407041 (2012) dengan judul *Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. Dalam pembahasannya Intan membahas tentang bagaimana seluk beluk secara praktis berperkara di pengadilan mengenai perceraian yang diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan ditinjau secara yuridis normatif.

Kemudian tulisan Anton Ismu Prabowo pada Universitas Airlangga dengan judul *Pembuktian Perkara KDRT berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* yang mana didalamnya dibahas tentang alat bukti dan keabsahan pembuktian berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ketika menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

Selanjutnya tulisan Diah Septita H dari Universitas Udayana yang membahas tesis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam kekerasan dalam Rumah Tangga dimana yang bersangkutan membahas berkenaan dengan bagaimana pihak-pihak dan hukum secara materil dapat melindungi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini dialami oleh perempuan atau isteri.

Selain itu tesis yang ditulis oleh Lember Missa pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dengan Judul Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang yang mana didalamnya dibahas berkenaan dengan sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam kategori tindak kriminalitas atau kasus pidana dan bagaimana penyelesaiannya di kota Kupang.

Dari beberapa tulisan atau tesis di atas Penulis dapat menegaskan bahwa keseluruhannya terdapat kesamaan dengan apa yang sekarang dibahas dan diteliti yakni berkenaan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi terdapat perbedaan yang signifikan yaitu dalam kasuistiknya berupa dinamika penyelesaian perkara yang berbeda tinjauannya dengan tulisan terdahulu, kemudian terdapat perbedaan lokasi penelitian yakni di pengadilan agama Donggala sementara tulisan terdahulu yang berlokasi jelas seperti halnya di Kota Kupang namun ada pula yang hanya bersifat penelitian pustaka yang tidak berbasiskan empirik.

## **E. Tujuan Dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian.
- b. Mengetahui bentuk dan dinamika penyelesaian perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala.

### **2. Kegunaan**

Dari pemaparan tujuan di atas, maka dideskripsikan kegunaan dari tesis ini adalah:

- a. Secara Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan, terutama menyangkut tentang cara dan dinamika penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Secara Praktis Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan hukum dan dapat diadakan penelitian lebih lanjut bagi yang berminat untuk utamanya bagi penegak hukum dan para akademisi.

## **F. Garis Besar Isi**

Sebagai rincian pelaksanaan penelitian dalam bentuk tesis ini, Penulis menguraikan susunan penelitian dalam bentuk struktur bab per bab yang dapat dilihat dibawah ini yaitu:

Bab satu bertemakan pendahuluan yang berisikan antara lain adalah latar belakang penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan pemaparan munculnya alasan untuk melakukan penelitian ini, kemudian dari itu lalu dibuatkan rumusan masalahnya yang dijadikan landasan pencarian dan penyelesaian persoalan, lalu dibubuhkan pula definisi operasional dan fokus penelitian yang dimaksudkan agar terjadinya kesamaan pemahaman antara Penulis dengan pembaca yang akan menganalogikan hasil bacaanya terhadap tesis ini, sehingga tidak terjadi perbedaan, lalu dikemukakan pula kajian pustaka dengan memaparkan penelitian sebelumnya dan penegasan akan *up to datenya* penelitian yang dihasilkan, kemudian diberikan pula penegasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas serta akan berguna bagi mereka yang akan menerapkan temuan sebagai rekomendasi Penulis dan sumbangsih terhadap daerah atau lokasi yang diteliti dan terakhir diberikan rasionalisasi penelitian dalam bentuk pemaparan garis besar isi.

Bab satu di atas, sangat berhubungan dengan bab dua yang mana Penulis mencoba memaparkan tinjauan teoretis mengenai tema atau isu yang diemban dalam penelitian ini yakni yang bersangkutan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diawali dengan pembahasan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut etimologi dan terminologinya serta dieksplorasi pula dari peraturan yang terkait dengan isu sentral penelitian, lalu diungkapkan pula data-data latar belakang yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan terakhir membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian dalam Bab tiga Penulis memaparkan bagaimana penelitian ini mendapatkan data dan mengolah data mulai dari menentukan jenis dan lokasi penelitian, lalu menentukan pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan pemberian penegasan terhadap sumber data yang diperoleh, kemudian diukur dengan instrument penelitian yang selanjutnya dilakukan teknik pengolahan data dengan cara analisis yang tepat terhadap data penelitian yang kemudian dibuatkan kesimpulan untuk dipaparkan dalam penelitian ini.

Sementara pada Bab empat Penulis memaparkan hasil temuan yang dilakukan dengan pemaparan yang sistematis sesuai dengan rumusan masalahnya yaitu pertama dengan memberikan gambaran umum keberadaan lokasi penelitian dengan pemaparan profil Pengadilan Agama Donggala, yang dalam hal ini antara Pengadilan Agama sebagai lembaga mandiri akan dipisahkan dengan pembahasan mengenai Kabupaten Donggala sebagai lokasi wilayah hukum dari Pengadilan Agama yang teradapat di Donggala. Kemudian diungkapkan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Donggala yang kasusnya diperkarakan di Pengadilan Agama Donggala, lalu diutarakan bentuk dan dinamika penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar kasusnya di Pengadilan Agama Donggala.

Terakhir pada Bab lima dipaparkan kesimpulan dari penelitian ini sekaligus implikasi yang mesti dilaksanakan sekaligus saran-saran dalam melanjutkan kejenjang penelitian selanjutnya agar dapat mengatasi masalahnya secara komprehensif dalam penanganan masalah kasus perceraian dalam rumah tangga



yang diakibatkan karena kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Donggala pada umumnya, dan khususnya perkara perdata perceraian di Pengadilan Agama Donggala.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak dapat disangkal oleh setiap individu. Perkawinan adalah sebagai sarana memenuhi kecenderungan untuk menjalankan hasrat biologis dan psikologis kemanusiaan serta bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan berbagi kasih sayang dan juga karena menginginkan adanya ketentraman yang secara alamiah (*sunnatullah*) telah ditentukan oleh Allah sebagai manifestasi untuk melangsungkan proses kehidupan di dunia ini.

Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Islam hal ini disinyalir dalam Q.S. al-Rum/30:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

‘dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), h. 572

Tujuan dari perkawinan yang diatur dalam tata nilai kemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari tata nilai keagamaan seseorang, yang mana secara universal tata nilai keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan dapat dikatakan sama disemua agama dan keyakinan.

Sementara dalam ajaran Islam, bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>2</sup>

Tatanan nilai yang diterapkan dalam perkawinan khususnya yang diatur di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan K. Bertens bahwa 'agama adalah motivasi yang terkuat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, apalagi yang berhubungan dengan hal yang sangat prinsipil dalam aturan masing-masing agama',<sup>3</sup> walaupun pada kenyataannya aturan itu sendiri terkadang tidak diindahkan oleh umat beragama yang bersangkutan pada beberapa aspek penerapannya secara umum.

Islam sebagai sebuah agama, menurut doktrin ajarannya tidak dapat pula memisahkan diri dalam persoalan kehidupan, karena agama itu sendiri ada, ditujukan agar memberikan petunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang baik atau memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak baik, walaupun nantinya akan berseberangan dengan doktrin dari kepercayaan dan agama lainnya. Dengan

---

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998), h. 56

<sup>3</sup>K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 35

demikian, pelaksanaan perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, sangat sejalan dengan aturan agama dan sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, yang terdapat pada Pasal 1 yaitu: 'Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.<sup>4</sup>

Pernyataan ini dapat dilihat pula dari komentar Ibrahim Hosen yang mengatakan bahwa nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan Allah yaitu untuk memakmurkan dunia ini dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia, sehingga perkawinan dibutuhkan untuk dapat mengatur dan sebagai wadah penyaluran potensi kemanusiaannya, dan untuk menjamin keteraturan tersebut maka mesti diikuti dengan ketundukan pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa Undang-Undang perkawinan tersebut menganut prinsip asas monogami.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan ayat Alquran yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

---

<sup>4</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>5</sup>Ibrahim Hoesein, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalak, Rujuk, dan Hukum Kewarisan, Jilid I*, (Cet. I, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), h. 77

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 57

Terjemahnya:

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>7</sup>

Undang-Undang ini mengatur pula hak dan kedudukan antara suami dan isteri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.<sup>8</sup>

Dalam perkawinan tidak semua pasangan dapat menjalani hubungan berumah tangga dengan baik dan mendapatkan ketenangan dari pasangannya masing-masing. Terkadang perkawinan itu harus menempuh kerikil tajam yang dapat membuat hubungan suami isteri tersebut menjadi tidak harmonis adanya, namun terkadang pula ada yang dapat melewati rintangan dan permasalahan dalam rumah tangga dengan cara yang telah disepakati sebelumnya ketika awal mereka membangun rumah tangga atau dengan cara terjadi saling pengertian diantara mereka, sehingga tidak harus permasalahan itu berlanjut kepada ketidakharmonisan mereka bahkan sampai pada hasil kesimpulan untuk berpisah atau bercerai.

Sebelum menempuh jalan perceraian Islam memberikan solusi terhadap penyelesaian perkara rumah tangga dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 99

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *loc. cit.*

melalui Q.S. an-Nisa/4:35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>9</sup>

Dalam ayat diatas Allah memberikan solusi sebelum menempuh jalan perceraian melalui pengadilan yaitu jika terjadi permasalahan pada suami dan isteri sebaiknya mereka atau pihak keluarga mengupayakan menghadirkan pihak yang dapat berposisi netral dari kedua belah pihak untuk dapat mendamaikan sekaligus mencari solusi bagi masalah yang mereka alami sehingga kemudian mereka dapat membina dan melanjutkan hubungan keluarga yang lebih harmonis.

Dalam Islam perceraian adalah sesuatu yang dijadikan jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan hubungan perkawinan tersebut. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Rasulullah mengatakan bahwa “Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah talak (perceraian)”.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Rofik bahwa salah satu prinsip

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 109

<sup>10</sup>*Subul Al-Salam*, Juz 3 (Qairo: Dar Ihya Alturas Alaraby, 1960), h. 168

mendasar dari syariat perkawinan Islam adalah asas mempersulit terjadinya perceraian.<sup>11</sup>

Dalam aplikasinya, asas mempersulit terjadinya perceraian dilaksanakan sebagai jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan mahligai rumah tangga. Sehingga prosedur dan tata laksana di pengadilan pun tergambar bahwa niat untuk bercerai itu terlaksana ketika semua proses persidangan sudah melalui jalan buntu untuk berdamai.

Walaupun asas ini diterapkan dijadikan asas untuk mencegah terjadinya perceraian, tetapi ada pula perceraian yang dilaksanakan di pengadilan harus dilanjutkan dengan putusan untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara suami isteri tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk menyatukan mereka lagi.

Salah satu faktor yang mengakibatkan putusanya hubungan perkawinan adalah karena adanya indikasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya atau pihak isteri kepada suaminya, walaupun yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya sehingga sang isteri mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Dalam Islam kekerasan dalam bentuk apapun yang berimplikasi kepada kezaliman (penganiayaan) tidak dibolehkan, apalagi yang terjadi di dalam rumah tangga setiap keluarga muslim. Rumah tangga muslim semestinya

---

<sup>11</sup>Ahmad Rofiq, *loc. cit.*

menghantarkan setiap individu yang ada di dalamnya harusnya mendapatkan ketenangan hidup sehingga tujuan membina rumah tangga agar menjadi mawaddah dan rahmah dalam syariat Islam dapat terpenuhi, namun hal itu kerap kali terjadi di dalam keluarga yang jauh dari nilai-nilai Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebutkan di atas, juga dapat dinilai mengandung unsur kejahatan, walaupun itu dilakukan kepada isteri atau bahkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Islam sangat tidak mentolelir berbagai bentuk kekerasan yang terjadi apalagi dilakukan dalam rumah tangga.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga.

Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab malapetaka, penganiayaan, perkosaan bahkan



pembunuhan justru sering terjadi di antara anggota keluarga itu sendiri.<sup>12</sup>

Kekerasan Terhadap Perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Kekerasan tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kekerasan. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara psikologis, fisik dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Bentuk pemerkosaan atas nama ikatan perkawinan atau pada posisi seorang pelaku yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual dimana pada saat itu korban tidak menghendaknya adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya bukan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau di tutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus, yakni terletak pada hubungan antara pelaku dan korban .

---

<sup>12</sup>G. Widiartana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), h. 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan “ Payung Hukum “ bagi para korban. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 ayat(1) yang maksud adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>13</sup>

Kekerasan rumah tangga yang terjadi dan menjadi fakta dalam masyarakat saat ini sangat berdampak pada semua aspek keluarga. Sehingga ada beberapa anak yang menjadi korban atas KDRT yang dilakukan oleh orang tuanya (Ayah) kepada ibunya, dan ini sangat mempengaruhi mental dan psikologinya di masyarakat.

Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa suatu keluarga hanyalah untuk melindungi nama baik keluarga. Pengorbanan sang isteri seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Banyaknya kasus yang terjadi khususnya KDRT, akan membuat begitu banyak pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan pula tingkat penyelesaian yang optimal oleh pengadilan agama terhadap penyelesaian kasus KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi disemua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi, menengah maupun bawah. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1

siapa saja baik itu perempuan maupun laki-laki dan tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan dan anak-anak. Sejah ini penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya, negara dilarang campur tangan ke ranah domestik warganegaranya. Seberat apa pun penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah tangga itu pula yang berhak menentukan untuk menyelesaikannya atau tidak.

Dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan matinya korban. Budaya masyarakat yang menstigma bahwa pertengkaran, kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat, secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dan anak pada kelompok masyarakat rentan, ketidakberdayaan mereka semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk.

Fakta di lapangan cenderung menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut terjadi akibat fisik mereka yang lemah dan ketergantungan mereka terhadap ayah atau suami mereka.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi karena secara umum dalam konstruksi sosial perempuan mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga mereka lebih rentan dalam menghadapi

ketidakadilan, kesewenangan maupun kekerasan. Selain itu dalam masyarakat ada kecenderungan pemikiran bahwa suami berhak atas isteri sehingga jika isteri bersalah ia mempunyai hak untuk memukulinya.

Dalam kehidupan di masyarakat terdapat kenyataan bahwa keutuhan rumah tangga sering terancam eksistensinya akibat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu yang merasa paling dominan dan berkuasa dalam hal ini banyak pelakunya adalah kaum laki-laki (suami) dengan korban kebanyakan berasal dari kaum perempuan (isteri).

Kekerasan yang terjadi berawal dari kurang kadar kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada isteri dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan jalan memisahkan kedua belah pihak baik dengan secara dicarikan penengah yang dapat menasehati kedua belah pihak atau salah satu pihak yang melakukan tindak kekerasan atau dengan jalan terakhir dengan cara dipisahkan untuk selamanya dalam artian bercerai melalui pengadilan agama.

Pengadilan agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihipunkan dari pengadilan agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah

tangga. Karena itu, meskipun Pengadilan Agama tidak mengadili tindak pidananya, pengadilan agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.

Data pasangan melakukan perceraian di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan, fenomena maraknya perceraian dalam rumah tangga di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat angka perceraian memperlihatkan *trend* yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, sedikitnya 200.000, bahkan 2 tahun kemudian, yakni data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama seluruh Indonesia sebanyak 258.069 perkara, di mana perkara cerai talak berjumlah 86.592 perkara, sedangkan cerai gugat berjumlah 171.477 perkara.

Komnas Perempuan dalam sekapur sirih yang ditulisnya dalam buku “Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga” menyebutkan: Dari tahun ke tahun, Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama adalah sangat signifikan. Kompilasi data yang dilakukan Komnas Perempuan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2007, jumlah kasus yang ditangani oleh 43 Pengadilan Agama mencapai 8.555 kasus. Ini merupakan 33,5% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat ditangani.

Dengan kata lain dari 25.522 kasus dimana korban datang langsung untuk mengurus sendiri penanganan kasusnya, hampir 60% melakukannya di

Pengadilan Agama. Artinya, perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama dan para hakimnya untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.

Kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama 'tersembunyi' dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para isteri. Alasan isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami – suatu tindakan yang menurut UU Penghapusan KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan paham bahwa meningkatnya perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun.

Berangkat dari latar belakang diatas maka menurut penulis, penelitian ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat, agar dapat memberikan informasi bahkan menjadi pedoman yang ingin mengetahui sejauh mana penyelesaian perkara di pengadilan agama khususnya kasus KDRT. Olehnya itu penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Donggala”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berawal dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinamika Penyelesaian Perkara

Perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala?

Untuk mempertajam pokok masalah dalam penelitian ini, maka dijabarkan kedalam sub masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga mengakibatkan perceraian?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **1. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan agar penulis dapat memberikan pemetaan dari pembahasan yang berkaitan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Dalam tesis ini judul yang diangkat adalah: “Dinamika Penyelesaian Perceraian Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala”.

- a. Dinamika penyelesaian perkara adalah perubahan dan upaya untuk menuntaskan sesuatu atau persoalan/masalah dalam proses peradilan.
- b. Perceraian adalah upaya atau perbuatan yang mengakibatkan putusya hubungan suami isteri.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

fisik, seksual, psikologis, dan atau penelataran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

d. Pengadilan Agama Donggala adalah tempat yang dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara perdata baik hukum keluarga, waris, zakat, infak dan shadaqah secara formil khusus bagi umat Islam di Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini Pengadilan agama Donggala adalah sebagai lokasi penelitian. Hal ini diambil disebabkan besarnya lingkup perkara perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama di Indonesia khususnya di Donggala, sehingga lebih spesifik peneliti hanya menfokuskannya pada perkara perceraian yang berkenaan dengan adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga.

## D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga telah terdapat tulisan terdahulu yaitu tulisan Intan Wijayanti, 3450407041 (2012) dengan judul *Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. Dalam pembahasannya Intan membahas tentang bagaimana seluk beluk secara praktis berperkara di pengadilan mengenai perceraian yang



diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan ditinjau secara yuridis normatif.

Kemudian tulisan Anton Ismu Prabowo pada Universitas Airlangga dengan judul Pembuktian Perkara KDRT berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana didalamnya dibahas tentang alat bukti dan keabsahan pembuktian berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ketika menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

Selanjutnya tulisan Diah Septita H dari Universitas Udayana yang membahas tesis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam kekerasan dalam Rumah Tangga dimana yang bersangkutan membahas berkenaan dengan bagaimana pihak-pihak dan hukum secara materil dapat melindungi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini dialami oleh perempuan atau isteri.

Selain itu tesis yang ditulis oleh Lember Missa pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dengan Judul Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang yang mana didalamnya dibahas berkenaan dengan sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam kategori tindak kriminalitas atau kasus pidana dan bagaimana penyelesaiannya di kota Kupang.

Dari beberapa tulisan atau tesis di atas Penulis dapat menegaskan bahwa keseluruhannya terdapat kesamaan dengan apa yang sekarang dibahas dan diteliti yakni berkenaan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi terdapat

perbedaan yang signifikan yaitu dalam kasuistiknya berupa dinamika penyelesaian perkara yang berbeda tinjauannya dengan tulisan terdahulu, kemudian terdapat perbedaan lokasi penelitian yakni di pengadilan agama Donggala sementara tulisan terdahulu yang berlokasi jelas seperti halnya di Kota Kupang namun ada pula yang hanya bersifat penelitian pustaka yang tidak berbasiskan empirik.

### ***E. Tujuan Dan Kegunaan***

#### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian.
- b. Mengetahui bentuk dan dinamika penyelesaian perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala.

#### **2. Kegunaan**

Dari pemaparan tujuan di atas, maka dideskripsikan kegunaan dari tesis ini adalah:

- a. Secara Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan, terutama menyangkut tentang cara dan dinamika penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara Praktis Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan hukum dan dapat diadakan penelitian lebih lanjut bagi yang berminat untuk utamanya bagi penegak hukum dan para akademisi.

#### **F. *Garis Besar Isi***

Sebagai rincian pelaksanaan penelitian dalam bentuk tesis ini, Penulis menguraikan susunan penelitian dalam bentuk struktur bab per bab yang dapat dilihat dibawah ini yaitu:

Bab satu bertemakan pendahuluan yang berisikan antara lain adalah latar belakang penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan pemaparan munculnya alasan untuk melakukan penelitian ini, kemudian dari itu lalu dibuatkan rumusan masalahnya yang dijadikan landasan pencarian dan penyelesaian persoalan, lalu dibubuhkan pula definisi operasional dan fokus penelitian yang dimaksudkan agar terjadinya kesamaan pemahaman antara Penulis dengan pembaca yang akan menganalogikan hasil bacaanya terhadap tesis ini, sehingga tidak terjadi perbedaan, lalu dikemukakan pula kajian pustaka dengan memaparkan penelitian sebelumnya dan penegasan akan *up to datenya* penelitian yang dihasilkan, kemudian diberikan pula penegasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas serta akan berguna bagi mereka yang akan menerapkan temuan sebagai rekomendasi Penulis dan sumbangsih terhadap daerah atau lokasi yang diteliti dan terakhir diberikan rasionalisasi penelitian dalam bentuk pemaparan garis besar isi.

Bab satu di atas, sangat berhubungan dengan bab dua yang mana Penulis mencoba memaparkan tinjauan teoretis mengenai tema atau isu yang diemban dalam penelitian ini yakni yang bersangkutan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diawali dengan pembahasan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut etimologi dan terminologinya serta dieksplorasi pula dari peraturan yang terkait dengan isu sentral penelitian, lalu diungkapkan pula data-data latar belakang yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan terakhir membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian dalam Bab tiga Penulis memaparkan bagaimana penelitian ini mendapatkan data dan mengolah data mulai dari menentukan jenis dan lokasi penelitian, lalu menentukan pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan pemberian penegasan terhadap sumber data yang diperoleh, kemudian diukur dengan instrument penelitian yang selanjutnya dilakukan teknik pengolahan data dengan cara analisis yang tepat terhadap data penelitian yang kemudian dibuatkan kesimpulan untuk dipaparkan dalam penelitian ini.

Sementara pada Bab empat Penulis memaparkan hasil temuan yang dilakukan dengan pemaparan yang sistematis sesuai dengan rumusan masalahnya yaitu pertama dengan memberikan gambaran umum keberadaan lokasi penelitian dengan pemaparan profil Pengadilan Agama Donggala, yang dalam hal ini antara Pengadilan Agama sebagai lembaga mandiri akan dipisahkan dengan pembahasan mengenai Kabupaten Donggala sebagai lokasi wilayah hukum dari

Pengadilan Agama yang teradapat di Donggala. Kemudian diungkapkan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Donggala yang kasusnya diperkarakan di Pengadilan Agama Donggala, lalu diutarakan bentuk dan dinamika penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar kasusnya di Pengadilan Agama Donggala.

Terakhir pada Bab lima dipaparkan kesimpulan dari penelitian ini sekaligus implikasi yang mesti dilaksanakan sekaligus saran-saran dalam melanjutkan kejenjang penelitian selanjutnya agar dapat mengatasi masalahnya secara komprehensif dalam penanganan masalah kasus perceraian dalam rumah tangga yang diakibatkan karena kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Donggala pada umumnya, dan khususnya perkara perdata perceraian di Pengadilan Agama Donggala.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Pengertian Umum**

##### **1. Pengertian Kekerasan Dalam RumahTangga**

Pembahasan pada bab ini dimulai dengan pembahasan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai topik pembicaraan serta untuk menghindari timbulnya kerancuan pada pembahasan berikutnya. Untuk dapat mengerti istilah kekerasan dalam rumah tangga maka terlebih dahulu perlu dibahas mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

Berbicara mengenai pengertian kekerasan ternyata sampai saat ini belum terdapat kesamaan pendapat dari para ahli, hal ini disebabkan masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam masalah ini dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya tempat mereka berasal dan tinggal. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Alquran pada Q.S. An.Nisa/3:35;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahanya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Pengenal.

Dalam hadits ada beberapa yang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Islam secara tegas melarang hal ini, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW : Suami dilarang memukul istrinya (HR. Baihaqi). Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW pun bersabda : Yang terbaik diantara kamu adalah mereka yang paling baik perlakuan sikapnya terhadap keluarga (HR. Ibnu Majah).

Jika seorang istri berbuat kesalahan, member maaf kepadanya, jauh lebih baik dari pada memukulnya, bahkan jika seorang suami mendapati istrinya ternyata mempunyai kekurangan-kekurangan, Al-Qur'an masih meminta suami untuk tetap bersabar. Boleh jadi, dibalik kekurangan itu tersimpan hikmah yang besar. Allah SWT berfirman : Maka jika kamu benci pada mereka (istri), sabarlah karena mungkin yang kamu benci itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak dari padanya (QS. Annisa : 19).

Oleh karena itu, berlaku kasar terhadap istri, seperti memukul, atau menampar dan seandainya adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran islam, agama islam berulang kali menegaskan betapa tingginya derajat seorang perempuan, terutama bagi yang berstatus sebagai ibu, sehingga seorang anak diwajibkan untuk mengabdikan dan berlaku sopan santun kepadanya (QS. Al-Ahqof : 15-17) bahkan kata Nabi SAW bahwa Ibu adalah manusia yang paling berhak menerima kebaktian dari seorang anak bahkan, ibu lebih berhak tiga kali dari ayah (HR. Bukhari, Muslim dari Abu Khurairah).

Jadi suami yang betul-betul beragama tidak akan mungkin menyengsarakan istrinya, artinya, kalau ada suami yang mengaku beragama, tetapi menganiaya istrinya berarti ada kemungkinan ; Pertama keberagamaannya diragukan dan kedua dia keliru memahami ajaran agamanya.



Mengenai hal itu dalam makalahnya yang berjudul Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik, Budi Sampurna menyatakan:

Definisi kekerasan ternyata belum mencapai kesepakatan. Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu keindividu lain, dan suatu negara ke negara yang lain dan budaya yang satu ke budaya yang lain. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap kekerasan pada beberapa budaya atau negara. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu, terutama terhadap hubungan pelaku korban tertentu, juga dianggap bukan kekerasan pada budaya dan negara tertentu.<sup>1</sup>

Dalam berbagai literatur terdapat penggunaan istilah kekerasan, dengan istilah *Violence*, *Assault* dan *Batter*.

Pengertian *Violence* dapat diartikan sebagai:

1. Ketidakadilan atau ketidak inginan kekuatan dengan disertai kebiadaban/ kekejaman dan kemarahan berapi-api.
2. Kekuatan fisik yang dilatih dan ketidasahan hukum, penyalahgunaan kekuatan, kekuatan tersebut digunakan untuk menentang keadaan biasa; melawan hukum, dan menentang kebebasan publik/ masyarakat.
3. Penggunaan dan sebuah penyaluran, pengrusakan, atau penyalahgunaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain yang sipelakunya perseorangan/lebih dan seorang yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain.

---

<sup>1</sup>Budi Sampurna, *Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan*, (Bandung: Citra Unbara, 2005), h. 10.

Sedangkan pengertian rumah tangga adalah adanya suasana yang mengikat anggota-anggota keluarga dengan ikatan batin yang halus dan kuat atau dapat pula diartikan sebagai kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga batin, ditambah dengan beberapa keluarga yang lain yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah sehingga merupakan kesatuan ke dalam dan ke luar.

Berdasarkan pengertian istilah kekerasan dan keluarga, dapat dirumuskan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Abdul Wahid dan Muhammad Irian memberikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagai "segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh unsur (anggota) keluarga terhadap unsur (anggota) keluarga yang lain, yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan perasaan takut".<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Kyriacou dalam Budi Sampurna menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (keluarga) didefinisikan sebagai berikut:

Pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya" atau secara lebih luas dapat disebutkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, yang melanggar hak individu.<sup>3</sup>

Uraian tersebut di atas pada dasarnya sudah cukup untuk mendefinisikan istilah kekerasan dalam rumah tangga, namun untuk dapat menentukan pengertian terhadap istilah dalam hukum pidana, maka tidak boleh terlepas dari ketentuan

---

<sup>2</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irian, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak-hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Adiat, 2001), h. 20.

<sup>3</sup>Budi Sampurna, *loc.cit*

peraturan perundangundangan yang berlaku. Berkaitan dengan topik pembicaraan dalam penulisan ini, maka definisi kekerasan dalam rumah tangga harus

Menurut Ahmad Chusairi dalam Christi Purwandaridinyatakan bahwa 'kekerasan sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*corsive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya'.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Maggie Hum, Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri).<sup>5</sup>

Dalam draft Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa sering pula terjadi adanya subordinasi lainnya, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.

Melihat definisi tersebut di atas, maka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi,

---

<sup>4</sup>Kristi Poerwandari, *Kekerasan terhadap perempuan (Tinjauan Psikologis Feministik)*(Bandung:Alumni, 2000), h. 109

<sup>5</sup>HasbiantoE.N, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah Seminar Nasional "Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Yogyakarta. 1996, h. 4

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian;,
- b. yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
- c. yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis.
- d. yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber sumber ekonomi.

Pendapat lain dari beberapa ahli diantaranya Kyriacou yang mendefinisikan kekerasan dalam keluarga sebagai perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh

pasangannya atau mantan pasangannya,<sup>6</sup> atau secara lebih luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, yang melanggar hak individu/perdata.

Adanya kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga serta mengabaikan hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari suatu masyarakat tertentu. Di dalam masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) menurut Arief Gosita adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami).<sup>7</sup>

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:

Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif, 1998), h. 7

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Victimologi dan KUHP*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1986), h. 269

<sup>8</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan lebih populer akhir-akhir ini adalah berkenaan dengan kekerasan yang berbasis gender (*gender-based abuse*). *Gender-based abuse* merupakan suatu tindak kekerasan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan atau sakit secara fisik atau psikologi pada perempuan. Tindakan kekerasan ini bisa berupa ancaman, pemaksaan dan perampasan kebebasan kepada seorang istri yang dilakukan oleh seorang suami dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, tentu pembaca sadar bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dapat dikategorikan kedalam empat jenis kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

---

<sup>9</sup>Rosmala Nur dan Fadliah, *Tindakan Kekerasan Suami Terhadap Istri di Kota Palu Sulawesi Tengah*. (Palu : 2001. Tidak diterbitkan), h. 2

Menurut Triningtyasasih dkk dalam Rosmala Nur dan Fadliah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri sering dilakukan dengan cara menampar, memukul, menendang, menyulutkan api rokok, melukai dengan senjata/benda yang akibatnya meninggalkan bekas secara fisik.<sup>10</sup>

Selain itu Rumah tangga merupakan bagian dari kelompok status sosial di suatu negara sehingga dikenal sebagai kunci kemakmuran suatu negara yang fundamental. Ketenangan dan ketenteraman dalam keluargalah yang dapat melahirkan generasi penerus yang tangguh, sebaliknya rumah tangga yang berantakan, akan mempengaruhi anak-anaknya sehingga dapat menjadi anak nakal.

Rumah tangga harus menjadi pelabuhan yang aman dan tenteram serta sebagai tambatan yang kokoh dan kuat bagi seluruh anggota keluarga. Harus merupakan suatu basis, tempat seluruh keluarga dapat berkumpul untuk berbincang-bincang dengan mesra dan penuh kasih sayang tentang masalah-masalah yang dihadapi. Dari keluarga seperti inilah akan terlahir generasi yang tangguh. Sebaliknya keluarga yang goncang akan menyebabkan anak-anak akan kehilangan rasa aman dan akan berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, apabila suami mulai mengabaikan kewajiban, dan isteri tidak memenuhi hak suaminya atau apabila suami sudah mulai kurang memperhatikan istrinya, lalu isteri merasa perlu membalas dendam kemudian menjauh, maka akan terbentuklah lingkaran syaitan.

Bila hal seperti itu dipertahankan, yang terjadi bukan saja berpisahnja meja makan dan ranjang, akan tetapi berpisahnja hati dan kasih sayang. Apabila seorang isteri tenggelam dalam kariernya, pulang sangat letih sementara suaminya di kantor menghadapi berbagai masalah dan ingin menemukan isteri dalam keadaan segar memancarkan senyum kemesraan, tetapi ia mendapatkan isteri cemberut karena

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 8

kelelahan. Hal tersebut bisa saja menimbulkan masalah yang runyam, bahkan akhirnya sampai pada perceraian.

Oleh karena itu perlu saling pengertian, sikap bijaksana dan kesadaran akan hak dan kewajibannya sesuai dengan profesinya di rumah tangga.

Namun sebagai isteri di rumah tangga seyogyanya berperan aktif sebagai ibu rumah tangga yang banyak mempunyai tanggung jawab atas kewajibannya. Sebab peran utamanya adalah mengasuh, mendidik serta mengarahkan anak-anaknya agar supaya berakhlak baik.

Sangat strategis jika kaum wanita dijadikan sebagai obyek utama dalam pengembangan sumber daya manusia sehingga meningkatkan kualitas diri wanita sudah merupakan suatu keharusan sehingga naiknya wanita dapat memposisikan diri sebagai motivator dalam rumah tangga yang sangat fundamental pada generasi sejak dini demi masa depan anak-anaknya. Karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sangatlah penting bagi seorang wanita untuk mengetahui kewajiban serta haknya dalam rumah tangga.

Berikut ini akan penulis paparkan beberapa hak dan kewajiban wanita dalam rumah tangga, antara lain adalah:

1. Seorang wanita hendaknya mampu beradaptasi dengan kehidupan suaminya di segala hal, baik di rumah maupun di kantor, atau dimana dan kapan saja.
2. Seorang wanita hendaknya memiliki jiwa keibuan terhadap anak-anaknya, karena anak-anaknya merupakan amanat Allah, sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi seorang isteri untuk mengembangkan kepribadian seorang anak dengan memberikan teladan yang baik.
3. Seorang isteri berhak memperoleh kesempatan di dalam berkarier di luar rumah sebagai manifestasi untuk mewujudkan kompetensinya di masyarakat sebagai salah satu bagian dari masyarakat sosial.



Memperhatikan beberapa hak dan kewajiban tersebut, maka diperlukan keseriusan bagi wanita untuk menambah pengetahuannya tentang kodrat wanita terutama di bidang agama guna membentengi arus peradaban yang sangat membahayakan bagi generasi Islam di masa yang akan datang.

### **B. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender.

Nasaruddin Umar mengatakan bahwa perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial-budaya. Persepsi seolah-olah mengendap di alam bawah sadar seseorang ialah jika seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan, maka itu juga menjadi atribut gender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Sesungguhnya atribut dan beban gender tidak mesti ditentukan oleh atribut biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa sosial-budaya. Yang pertama dapat disebut alat

---

<sup>11</sup>Achie Sudiarto Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta: Kelompok kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000), h. 18

kelamin biologis (*physical genital*) dan yang kedua dapat disebut alat kelamin budaya (*cultural genital*).

Secara biologis alat kelamin adalah konstruksi biologis karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan keadaan konstruksi budaya mulai terbentuk. Melalui atribut tersebut seseorang akan dipersepsikan sebagai laki-laki atau perempuan. Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran, dan status di dalam masyarakat. Atribut gender yang merujuk kepada atribut jenis kelamin biologis menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan didalam masyarakat, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini.

Seberapa besar peranan perbedaan jenis pada dasarnya pandangan mengenai wanita dibedakan berdasarkan dua teori yaitu:

- a. Teori *Nurture* beranggapan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalutertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Teori *Nature*, merupakan teori yang dianut oleh Cesare Lambroso yang menganggap wanita memiliki pembawaan isiologik dan psikologik yang berbeda dari pria, di mana wanita memiliki ciri perilaku yang pasif karena terlahir sesuai

dengan sifat-sifat sel-sel telur yang pasif pula ini berbeda dengan sel-sel jantan yang aktif.<sup>12</sup>

Teori ini menerima perbedaan kodrat biologis secara alamiah antara laki-lakidan perempuan. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan. Teori *nurture* di atas lalu berpindah ke teori *nature*. Pendekatan nature dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan berbangsa.

Kartini Kartono dalam Psikologi Anak mengungkapkan; Teori Psikoanalisa dari Sigmund Freud beranggapan bahwa peran dan relasi jender ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam *phallic stage*, yaitu suatu masa ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimiliki masing-masing. Rasa rendah diri seorang anak perempuan mulai muncul ketika dirinya menemukan "sesuatu yang kurang", yang oleh Freud diistilahkan dengan "kecemburuan alat kelamin" (*peniscy*). Jadi jelas bahwa unsur biologis merupakan faktor dominan (*delerminut factor*) di dalam menentukan pola perilaku seseorang.

---

<sup>12</sup>Erlyin Endarti, dalam Wirjono Projodikoro, *Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1980), h. 119

Talcott Parsons & Balles berpendapat bahwa keluarga sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Karena itu peran keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami dan istri dalam keluarga atau antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hidup masyarakat.

Menurut Arief Budiman bahwa pembagian kerja secara sexual merupakan sesuatu yang wajar dari kodrat wanita itu sendiri, yang membuat wanita submisif, kurang aktif dan sebagainya sehingga menjadi ibu rumah tangga merupakan kenyataan yang tepat, oleh karena keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak yang merupakan pengelompokan manusia yang paling universal, terdapat disegala tempat dan zaman.

Teori Konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi jender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut Karl Marx, yang juga mendapat dukungan Frederich

Engels, relasi jender yang terjadi di dalam masyarakat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (*social construction*).

Randall Collins beranggapan bahwa keluarga adalah wadah tempat pemaksaan suami sebagai pemilik dan wanita sebagai abdi. Margrit Eichlen beranggapan keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender. Paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egeliurian*) memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut disediakan program khusus (*affirmation action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang selama ini didominasi oleh laki-laki.<sup>13</sup> Akibatnya dapat diduga timbul reaksi negatif dari kaum laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut yang dikenal dengan perilaku *malebacklash*. Keberhasilan sebagian masyarakat barat dalam kesetaraan perempuan telah menimbulkan perubahan sikap dan perilaku perempuan yang bergaya maskulin seperti agresif, kasar, egoistis dan tidak mau menikah.

Teori-teori feminis yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan antara lain dipelopori oleh Freda Adler, mengakui bahwa wanita masa kini memang berangsur-angsur meninggalkan gambaran wanita yang penuh kelembutan dan keibuan untuk berubah menjadi wanita yang tangkas, di mana perubahan tingkahlaku ini diperlukan untuk merebut lowongan kerja yang didominasi oleh laki-laki, walaupun ia menyangkal jika dalam memperjuangkan haknya sebagaimana yang dimiliki pria.

---

<sup>13</sup>Lihat Achie Sudiarto Luhulima, *op. cit.*, h. 19

Sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh faktor budaya dalam masyarakat.

Ketimpangan peran dan relasi jender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda, sehingga muncul berbagai aliran feminis dengan alternatif teorinya masing-masing. Teori Sosio-biologis yang mencoba mengelaborasi teori nature dan nurture beranggapan bahwa faktor biologi dan faktor sosial-budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Di samping aliran tersebut terdapat paham kompromis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam mewujudkan gagasan tersebut maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran dari laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hubungan antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna melengkapi satu sama lain, R. H. Tawney menyebutkannya bahwa keragaman peran, apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, budaya pada hakekatnya adalah realita kehidupan manusia. Oleh karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional dan bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (*quota*) dan tidak bersifat universal. Pandangan ini membedakan sekurangnya 3 konteks kehidupan seseorang, yaitu keluarga,

masyarakat dan agama. Sedang situasional menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan sama disemua strata masyarakat.

Karena itu Vandana Shiva menyebutkan *equality in diversity* (persamaan dalam keragaman). Istilah patriarki merupakan istilah yang digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kausa dengan laki-laki menguasai wanita dan untuk menyebut sistem yang membuat tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. budaya patriarki inilah yang menimbulkan terjadinya sikap apriori dan diskriminatif terhadap kaum wanita pada masa itu terutama pada saat proses pembentukan peraturan perundangan yang akan berlaku. Sylvia Walby dalam buku "*Theorizing Patriarchy*" menyatakan bahwa patriarki merupakan suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan menghisap perempuan. Pemahaman bahwa patriarki itu merupakan sistem membantu perempuan menolak pendapat determinisme biologis yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara alamiah berbeda karena biologi atau badannya dan karena itu mendapatkan peran yang berbeda atau pendapat bahwa setiap laki-laki selalu berada dalam posisi subordinat.<sup>14</sup>

Selanjutnya Bashin Kamla menyatakan bahwa melekat sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan bahwa perempuan harus dikontrol laki-laki dan bahwa perempuan adalah milik laki-laki.

---

<sup>14</sup>Lihat *Ibid.*, h. 20

Adapun bentuk-bentuk kekuasaan dan kontrol sistem patriarki terhadap perempuan menurut F. Nadia dalam Achmad Ali <sup>15</sup> mengatakan bahwa:

1. Penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga.
2. Penyiksaan secara ekonomi, membuat istri tergantung secara ekonomi, tidak boleh bekerja, keuangan dipegang oleh suami.
3. Penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangannya hanya sebagai obyek seksual.
4. Ancaman, ini meliputi: mengancam akan menyiksa, mengancam akan membawa pergi anak, ancaman akan membunuh, dan lain-lain.

Dengan demikian bahwa keberadaan perempuan dan budaya patriarki di masyarakat pada akhirnya sangat membatasi ruang lingkup bergerakka kaum hawa ini di segala sisi kehidupan mereka, baik ketika mereka masih kanak-kanak, remaja, dewasa dan berumah tangga. Keberadaan kondisi yang demikian itulah yang menimbulkan ketimpangan posisi antara kaum laki-laki dengan perempuan dan ini pulalah yang membuat dan memberikan peluang keperkasaan kaum laki-laki dari segi negatifnya, walaupun dapat diakui pula dengan posisi laki-laki yang superioritas kepada perempuan yang kebanyakan bersifat hiperioritas dapat menimbulkan efek positif bagi kaum perempuan jika seandainya kaum laki-laki

---

<sup>15</sup>Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif, 1998), h. 10



tidak semena-mena mendahulukan egosentrisnya sebagai superior, yang semestinya dapat bermakna membimbing dan mengarahkan dengan kekuatan yang dimilikinya.

### ***C. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga***

Dalam sub-sub terdahulu telah diuraikan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya pada sub berikut ini penulis ingin mengupas mengenai bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan dalam rumah tangga. Namun sebagai bahan perbandingan maka dalam uraian selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai penggolongan bentuk-bentuk kekerasan secara umum, kemudian baru dibahas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kristi Poerwandari, dalam makalahnya berjudul Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan feministik, mengatakan bahwa semua bentuk kekerasan, siapapun pelaku dan korbannya dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar antara lain sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam area *domestic* hubungan intim personal, yakni berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga.
2. Hubungan kedekatan lain. Termasuk disini penganiayaan terhadap isteri, penganiayaan terhadap pacar, bekas isteri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.
3. Kekerasan dalam area publik, yakni berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau hubungan personal lain. Dapat dimaksudkan disini,

berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas cakupannya, baik yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja termasuk untuk kerja-kerja domestik, misalnya: baby sister, pembantu rumah tangga, perawat orang sakit), ditempat umum (bus dan kendaraan umum, dipasar, direstoran, dilembaga-lembaga pendidikan, dan tempat-tempat umum lainnya). Dalam bentuk publikasi atau produk dan praktek ekonomis yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa dll) maupun bentuk-bentuk lain.

4. Kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja dalam lingkup negara, yakni kekerasan secara fisik seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, didiamkan/ dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun terjadinya. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran-pelanggaran hak-hak perempuan dalam pertercangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, berkaitan dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kehamilan paksa.

Sementara Hayati dkk menyatakan bahwa kekerasan psikis yang sering terjadi pada istri adalah dengan menghina istri dan melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri, melarang istri untuk mengunjungi keluarga atau teman, melarang istri untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, diancam untuk diceraikan, memisahkan dengan anak-anak apabila tidak mematuhi kemauan suami.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hayati, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Rafika Annisa Women's Crisis Center: Yogyakarta, 2000), h. 4

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Triningtyasasih sebagaimana dikutip oleh Rosmala Nur dan Fadliah menyatakan bahwa kekerasan psikis mempunyai bentuk seperti penghinaan, komentar merendahkan dan melukai harga diri orang lain, membatasi pergaulan istri, mengancam akan mengembalikan istri pada orang tuanya, menceraikan dan memisahkan dari anak-anak, serta memaksa istri untuk menuruti kemauan suami.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Wimbari berkenaan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menemukan bahwa perilaku suami yang dianggap tindakan kekerasan kepada istri adalah, berkata kasar, menakut-nakuti (intimidasi), mempunyai wanita idaman lain (WIL), tidak di percayai dalam penggunaan uang belanja, dan tidak diajak bicara selama beberapa saat. Sedangkan perilaku suami yang dianggap tindak kekerasan istri adalah di teror, disindir, di ancam, tidak diberi uang belanja, dan suami mempunyai WIL<sup>18</sup>

Menurut Triningtyasasih dkk sebagaimana di kutip Rosmala Nur dan Fadliah menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbentuk dimana suami memaksakan istri untuk melakukan hubungan seksualmeski istri menelak karena sakit atau dengan pola yang tidak dikehendaki istri dan memaksa istri untuk menjadi pekerja seksual.

Hal yang sama berkenaan dengan tindak kekerasan seksual terhadap istri juga dikemukakan oleh Grant dalam Chusairi sebagaimana dikutip oleh Rosmala

---

<sup>17</sup>Rosmala Nur dan Fadliah, *op cit.* h. 9

<sup>18</sup>*Ibid.*

Nur dan Fadliah yang menyatakan bahwa tindak kekerasan seksual suami adalah meliputi paksaan melakukan hubungan seksual dengan cara yang kasar atau tidak senonoh atau yang tidak dapat di terima oleh istri.<sup>19</sup>

Sementara bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan ekonomi, Saraswati dkk mendefinisikan tentang kekerasan ekonomi merupakan tindakan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan yang menciptakan ketergantungan secara ekonomi dengan membatasi seseorang untuk bekerja didalam atau di luar rumah, dan atau membiarkan seseorang bekerja untuk di eksploitasi di luar rumah dan atau menelntarkan anggota keluarga.<sup>20</sup>

Sangat beragam bentuk-bentuk kekerasan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga dilakukan oleh suami. Berkenaan dengan kekerasan ekonomi ini Triningtyasasih dkk mengemukakan tentang bentuk kekerasan ini sebagaimana dikutip oleh Rosmala Nur dan Fadliah dengan cara :

- a) Tidak memberi nafkah,
- b) Membatasi istri dengan dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomi istri,
- c) Menguasai hasil kerja istri, dan
- d) Memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan suami.<sup>21</sup>

Sementara Hayati berpendapat bahwa yang tergolong kedalam bentuk-bentuk kekerasan ekonomi oleh suami terhadap istri adalah tidak diberinya nafkah,

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Saraswati, T. *Pelecehan dan kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Masyarakat* Makalah Seminar Kekerasan Seksual (tidak diterbitkan. Yogyakarta: PPK-UGM dan Ford Foundation) h. 3

<sup>21</sup>Rosmala Nur dan Fadliah, *op cit.* h.10

membatasi nafkah secara sewenang-wenang, memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami dan membiarkan istri bekerja lalu hasilnya dikuasai suami.<sup>22</sup>

Tindakan-tindakan kekerasan yang telah dikemukakan tersebut juga di ditambahkan oleh Munti bahwa tidak diberikannya nafkah kepada istri setelah perceraian, juga di anggap sebagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami.<sup>23</sup>

#### **D. Faktor Resiko Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Sebagai respon positif atas tindakan kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga ditandai dengan begitu banyaknya lembaga-lembaga advokasi, LSM dan lain sebagainya yang bergerak di bidang pembelaan hak-hak perempuan. Pendidikan yang rendah bagi seorang istri, terkadang menjadi karakteristik perempuan yang memiliki resiko yang lebih besar mendapatkan kekerasan oleh pasangan.

Jika dilihat dari karakteristik pria, ada beberapa faktor yang berasosiasi dengan kemungkinan pria melakukan kekerasan terhadap istrinya, yakni suami suka minum alkohol, punya hubungan wanita lain, dan lebih menyukai anak laki-laki ketimbang perempuan. Lelaki juga cenderung melakukan kekerasan terhadap istrinya bila mana laki-laki tukang cemburu, mencurigai bahwa istrinya tidak

---

<sup>22</sup>Hayati, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Rfika Annisa Women's Crisis Center : Yogyakarta, 2000), h 5.

<sup>23</sup>Munti, R.B, *Sosialisasi Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, 2000: LBH-APIK Jakarta, h. 2.

setia.<sup>24</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki bukan hanya merupakan titik kulminasi dari kemarahan laki-laki yang tidak bisa di kontrol. Akan tetapi laki-laki sebagai pelaku kekerasan lebih percaya dengan segala keegoisannya merasa lebih berhak mengontrol seluruh aspek kehidupan istrinya.

Berdasarkan hasil penelitian Kartiningrum mengemukakan bahwa karakteristik suami yang sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suami yang :

1. Mudah cemburu,
2. Berusaha mengisolasi istri,
3. Selalu mengontrol istrinya,
4. Berkepribadian ganda
5. Temperamental,
6. Mudah marah tanpa ada alasan yang jelas,
7. Meyakini kekerasan sebagai tindakan yang lumrah.<sup>25</sup>

Di satu sisi karakteristik atau ciri-ciri suami yang suka melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan oleh :

1. Tidak mau disaingi dalam hal pendapatan,
2. Meyakini bahwa dirinya adalah pemimpin dalam keluarga yang menjadi penentu dan pengambil keputusan,
3. Meremehkan istri,
4. Ringan tangan,
5. Emosional, dan
6. Menganggap wajar melakukan kekerasan terhadap istrinya yang melawan istri.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hakimi, dkk. *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah*. (Yogyakarta : LPKGM-UGM, Rafika Annisa WCC. 2001), h. 2.

<sup>25</sup> T. Kartiningrum, *Hubungan Antra Tingkat Religiusitas Suami dan Kecenderungan Kekerasan Terhadap Istri*. Skripsi Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Surabaya (Tidak di Terbitkan). Surabaya : 2000. h. 14

Karakteristik-karakteristik suami yang sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa disatu sisi mengindikasikan adanya faktor bawaan (warisan) dari keluarga dimana ia berasal. Sementara di sisi yang lain lebih menampakkan sikap arogansinya dan superioritas atribut budaya sebagai penguasa tertinggi dan yang paling bertanggung jawab di dalam rumah tangga.

Anggapan tersebut terkadang dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan suami untuk mendidik dan mengajar istrinya dengan cara apa saja yang diinginkannya.

Dengan demikian kekerasan yang terjadi dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang bahkan dalam situasi tertentu dapat dilakukan oleh negara. Berdasarkan penggolongan kekerasan tersebut, maka kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam golongan pertama, yaitu kekerasan yang terjadi dalam area domestik/hubungan intim personal karena baik dan pelaku maupun korbannya adalah orang yang saling mengenal dan mempunyai hubungan dekat (keluarga) diantara keduanya.

Mengenai bentuk kekerasan terhadap perempuan terutama yang terjadi dalam rumah tangga, ternyata merupakan permasalahan yang hampir dialami setiap negara diseluruh belahan dunia, yang mana korbannya kebanyakan adalah pihak perempuan (isteri), mengenai hal ini dapat diperoleh fakta:

---

<sup>26</sup> Munti, R.B, *Loc cit.* h. 2.

Menurut laporan Bank Dunia pada bentuk kekerasan terhadap perempuan yang kebanyakan adalah penyiksaan terhadap isteri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim dan mengarah pada sistematika kekuasaan dan control. Dalam hal ini, penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap isterinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi.

Terhadap fenomena tersebut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan<sup>27</sup> menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi dalam area domestik ini dapat terjadi dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, misalnya menampar, memukul, menendang, menjambak, membekap, melukai, dll.
2. Kekerasan psikologis, misalnya menghina, meremehkan, berbicara kasar, memaki, mengancam/ memaksa sebagai sarana.
3. Kekerasan seksual, misalnya memaksa unsur anggota keluarga lain (perempuan) untuk melakukan hubungan seksual.

Sedangkan menurut Kristi Poerwandari<sup>28</sup> dengan rumusan yang hampir sama dengan pendapat terdahulu membagi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi 5 (lima) bentuk, yaitu antara lain meliputi; Fisik, Psikologis, Seksual, Finansial dan Spiritual untuk lebih lengkapnya penjelasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Abdul Wahid dan Muh. Irfan, *op. cit.*, h. 22

<sup>28</sup> Lihat Kristi Poerwandari dalam Achie Sudiarto Luhulima, *op. cit.*, h. 75



- Fisik : Memukul, menampar, mencekik menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/ senjata, membunuh.
- Psikologis : berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat, korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dll)
- Seksual : melakukan tindakan yang mengarah pada keajakan/ desakan seksual seperti meraba, mencium, dan/ atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan, dan mengarah pada aspek jenis kelamin/ seks korban memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas- aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan atau melukai korban.
- Finansial : mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang samapi sekecil-kecilnya, semua dengan maksud untuk mengendalikan korban.

Spiritual : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Setelah penguaraian panjang lebar mengenai bentuk-bentuk dan kekerasan dalam rumah tangga, namun untuk dapat mengambil kesimpulan tentu harus tetap mengacu dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terkait dengan topik pembicaraan pada sub ini mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, disebutkan dalam pasal 5 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap oranglingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. kekerasanfisik;
- b. kekerasanpsikis;
- c. kekerasanseksual; atau
- d. penelantaranrumahtangga.<sup>29</sup>

Dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan diatas, maka secara garis besar kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bentuk, antara lain sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik.

---

<sup>29</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan dalam Rumah Tangga. Pengertian ini serupa, namun tidak sama dengan pengertian penganiayaan yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Perbedaannya karena kekerasan fisik dalam pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghanusan Kekersan dalam Rumah Tangga diberikan penafsiran otentik, sedangkan dalam pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian penganiayaan, tetapi hanya disebutkan kulaifikasi deliknya saja.

Namun masalahnya muncul karena ternyata dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tenta. ig Penghapusan Kekersan dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari Rasa sakit, Jatuh sakit dan luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka/terdakwa, sehingga pengertian tersebut harus di cari dalam KUHP maupun yurisprudensi.

Mengenai bentuk kekerasan fisik, Budi Sampurna mengutarakan pendapatnya secara terperinci untuk menggolongkan perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang dapat termasuk sebagai kekerasan fisik yaitu:

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambalan, pukulan, cekikan, bekapan,luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekrasan dengan benda tajam, siraman zat kimia atau air panas,

menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan ke alat-alat seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan paksa (pemeriksaan). Pada pemeriksaan atas korban akibat kekerasan fisik, yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non accidental*) pada perempuan. Jelas, itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dan yang ringan hingga yang fatal.

Kekerasan fisik ini dapat dilihat secara nyata karena menimbulkan bekas atau luka pada anggota badan/ tubuh korban. Tetapi untuk dapat mengetahui adanya kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena dan pengamatan sekilas tampak bahwa luka-luka yang timbul akibat kekerasan sulit dibedakan dengan kekerasan yang terjadi akibat kecelakaan. Sehingga untuk dapat mengetahuinya diperlukan pengamatan yang teliti dan seksama terhadap perlukaan tersebut, apabila ditemukan adanya perlukaan jamak (lebih dari satu) dengan berbagai tahap penyembuhan dapat diindikasikan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan fisik.<sup>30</sup>

Selanjutnya bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat dilihat pula dalam rumusan pasal 44 Ayat (1) sampai (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengenai ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan fisik yakni:

- (1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

---

<sup>30</sup>Budi Sampurna, *op. cit*, h. 12

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

(3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

(4). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Melihat rumusan Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4)maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan jenis kekerasan fisik ini terbagi lagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu kekerasan fisik biasa, kekerasan fisik ringan,

kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban.<sup>31</sup>

#### b. Kekerasan psikis

Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang kedua adalah kekerasan psikis yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Jenis tindak pidana kekerasan psikis adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk lainnya yang ada padanannya dalam KUHP, yakni kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan).

Kekerasan psikis ini sulit untuk didefinisikan, berkaitan dengan hal tersebut Budi Sampurno mengatakan bahwa:

Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada isteri agar terpenuhi kebutuhan

---

<sup>31</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

emosinya, lebih lanjut dikatakan kekerasan psikologis atau mental ini dapat dimasukkan semua jenis tindakan yang bersifat verbal abuse, pelecehan, sikap memiliki yang berlebihan, isolasi, ancaman atau berbagai bentuk lain.

Selanjutnya larangan melakukan kekerasan psikis dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diancam dengan pidana dalam Pasal 45, sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>32</sup>

### c. Kekerasan Seksual

Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ketiga adalah kekerasan seksual yakni meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan

---

<sup>32</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka tolak ukur untuk dapat menyebut sebuah perbuatan sebagai kekerasan seksual adalah apabila terdapat unsur pemaksaan dan pelaku terhadap korbannya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual ini dilakukan tanpa paksaan, melainkan dengan rayun atau karena iming-imingsesuatu, tetapi secara kasus yang sering terjadi adalah dilakukan dengan unsur paksaan.

Berkaitan dengan itu Budi Sampurnamenjelaskan bahwa pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi pada anak-anak, yang terjadi karena keterbatasan pengalaman dan penalarannya belum dapat memberikan keputusan atau persetujuan yang diberikan oleh anak dengan usia tertentu tidak dianggap persetujuan yang sah. Kemungkinan terjadinya tindakan ini telah lama disadari oleh para ahli hukum sehingga delik-deliknya telah lama diatur dalam KUHP. Seorang anak yang berusia belum cukup 15 tahun dianggap belum dapat memberikan persetujuan yang sempurna sehingga dijadikan delik aduan, sehingga



seorang anak yang berusia 12 tahun dianggap belum bisa memberikan persetujuan sehingga dijadikan delik biasa.<sup>33</sup>

Dengan demikian, apa yang dimaksud hubungan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini, apakah kualifikasinya sama dengan persetubuhan atau kualifikasinya adalah persetubuhan dan juga pencabulan atau bahkan pengertiannya lebih luas dari persetubuhan dan pencabulan. Hal ini tidak jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### d. Penelantaran Rumah Tangga

Jenis tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang keempat adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan' orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

---

<sup>33</sup>Budi Sampurna, *op. cit.* h. 15

Selanjutnya larangan melakukan penelantaran dalam rumahdiancam dengan pidana dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat(2).

KUHP sendiri memiliki pasal yang sepadan/sejenis dengan penelantaran rumah tangga yakni diatur dalam BAB XV. Tentang meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan, yakni Pasal 304 yang menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib member kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancan, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan busan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".<sup>34</sup> Yang dihukum menurut pasal ini adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib member kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pun

---

<sup>34</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

wali terhadap anak peliharaannya. Orang kaya membiarkan saudaranya dalam kesengsaraan, tidak dikenankan pasal ini, karena menurut hukum ia diwajibkan untuk menyokongnya.<sup>35</sup>

Penelantaran dalam rumah tangga sangat berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sebab yang mendasari terjadinya kekerasan adalah faktor ekonomi, mengenai hal tersebut Budi Sampurna mengatakan:

Penelantaran rumah tangga adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kurangnya menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran. Namun harus hati-hati untuk membedakan antara ketidak mampuan ekonomis dengan penelantaran yang disengaja. Bnetuk kekerasan jenis ini menonjol, khususnya terhadap anak karena anak belum mampu mengurus dirinya sendiri.

Dengan demikian seorang laki-laki (suami) yang tidak mampu memberikan kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, dan sarana-sarana lain, kepada keluarganya tidak dapat begitu saja dikatakan melakukan penelantaran rumah tangga. Selama ia telah berusaha dengan sungguh-sungguh secara maksimal maka ia tidak dapat dikenai tuduhan melakukan penelantaranrumah tangga. Sebaliknya bagi seorang suami yang sebenarnya mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk menghidupi keluarganya, tetapi karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan

---

<sup>35</sup>Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap*, ( Bogor: Politeia, 1976), h. 193

kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan isterinya maka ia dapat dikenakan tuduhan melakukan penelantaran dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

#### **E. Dampak Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan.<sup>37</sup>

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi terkadang terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami isteri, suami/isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian.<sup>38</sup>

Disamping itu pula suatu perceraian dapat dilakukan dikarenakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Ketidak mampuan istri untuk bertahan dalam sebuah tindakan kekerasan, terkadang menjadi suatu faktor bagi seorang istri untuk menghendaki perceraian.

---

<sup>36</sup>Budi Sampurna, *op. cit.*, h. 16

<sup>37</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 2004), h. 156.

<sup>38</sup>*Ibid.*,

Namun, tidak sedikit juga seorang istri tetap bertahan dalam suatu ikatan perkawinan meskipun dirinya selalu mengalami kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Istri yang tetap bertahan dalam suatu ikatan perkawinan tersebut Menurut Michael P Johnson sebagai mana di kutip Ester Lianawati dalam bukunya *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Femini*, yang menyatakan bahwa seseorang dapat bertahan dalam perkawinannya karena adanya tiga bentuk komitmen. Ketiga bentuk komitmen tersebut adalah :

1. Komitmen personal yang mengandung arti sejauh mana seseorang ingin mempertahankan hubungannya karena faktor-faktor yang bersifat pribadi. Faktor-faktor itu adalah cinta, perkawinan yang memang memuaskan, dan identitas sebagai suami/istri.
2. Komitmen moral, yakni rasa bertanggungjawab secara moral karena menganggap pernikahan harus berlangsung sepanjang hidup, merasa pasangan membutukannya, dan merasakan kewajiban untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai.
3. Komitmen struktural yakni keinginan bertahan dalam suatu hubungan karena adanya faktor-faktor penahan yang bersifat struktural. Faktor struktural itu berupa tekanan sosial jika bercerai, prosedur perceraian yang sulit dan menghabiskan waktu serta biaya dan investasi yang telah ditanamkan selama

hubungan berlangsung dan tidak dapat diambil kembali (*irretrievable investments*).<sup>39</sup>

Pada dasarnya setiap pasangan yang telah membangun komitmen untuk berrumah tangga, tidak ada yang pernah berkeinginan bahwa jalinan perkawinan itu dapat berakhir dalam suatu perceraian. Akan tetapi dengan adanya faktor-faktor tertentu terkadang menjadi suatu alasan untuk melakukan perceraian.

Dalam kenyataannya, seorang suami sangat mudah jika dirinya berkeinginan untuk menceraikan istrinya. Akan tetapi bagi seorang istri menganggap begitu sulit berfikir untuk bercerai, apalagi jika perkawinannya sudah di karuniai keturunan.

Tindakan perceraian pada dasarnya, merupakan suatu perbuatan yang halal, akan tetapi sangatlah di murkai oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَادَهُ

Artinya :

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Ester Lianawati dalam bukunya *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Femini*. Cet pertama. (Yogyakarta : Paradigma Indonesia, 2009), h. 30.

<sup>40</sup>Digital, *Bulughul Maram* Pustaka Al-Hidayah versi 2.0 © 1429 H / 2008 M. Bab Thalaq

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa, perceraian pada prinsipnya merupakan hal yang diharamkan dalam agama. Namun sesungguhnya Allah membenci perbuatan ini. Hemat penulis bahwa perceraian menjadi di benci oleh Allah di sebabkan karena beberapa hal, namun menurut penulis yang menjadi pokok utama di bencinya oleh Allah tindakan perceraian ini mengingat masa depan pendidikan anak dan perkembangan psikologi anak akan menjadi rusak.

Berkenaan dengan perceraian ini, di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang masing-masing juga mengatur tentang segala prosedural yang berkaitan dengan perkawinan hingga perceraian.

Dalam pasal 13 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.<sup>41</sup>

Sementara berkenaan putusnya suatu perkawinan sebagaimana di nyatakan dalam pasal 114 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam : Jakarta, 1998), h. 56.

<sup>42</sup>*Ibid.*

Berkenaan dengan perceraian yang merupakan keinginan seorang istri yang terkadang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Maka hukum Islam memberi ruang kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya yang kategorinya sebagai talak tebus (Khulu).

Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali, dalam bukunya *Fiqh Munakahat*. Beliau mengemukakan sebagai berikut:

Dalam menghadapi kesewenang-wenangan suami, hukum Islam memberi kesempatan kepada Istri untuk meminta talaq kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh istri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang di sebut dengan istila khulu '(talak tebus).<sup>43</sup>

Disamping talak tebus tersebut, hukum Islam juga memberi ruang kepada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui Pengadilan agama.

Hal yang sama juga sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Rahman Ghazali, dalam bukunya *Fiqh Munakahat*. Beliau mengemukakan:

Juga hukum Islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya sehingga menimbulkan mudharat baginya, bila perkawinan dilanjutkan seperti suami menderita sakit yang wajib di jauhi, suami berperangai buruk, atau sebab-sebab lain semacam itu sehingga istri selalu merasa tersiksa hidup bersama suaminya, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan Agama kemudian hakim menceraikan antara keduanya melalui keputusan pengadilan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Edisi Pertama, Cetakan ke-4. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 207.

<sup>44</sup> *Ibid.*



Berkenaan dengan gugatan cerai oleh istri di pengadilan agama sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 d dan f, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
- b. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

Pasal 116 ayat (d) dan (f) tersebut di atas, merupakan indikasi pemberian ruang bagi seorang istri yang senantiasa mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan gugatan perceraian kepada suaminya.

Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang dalam perjalanan rumah tangga yang telah dibina apabila telah dikarunia oleh keturunan, maka sudah dapat dipastikan bahwa perceraian tersebut akan memberikan dampak terhadap anak-anaknya, apakah itu dampak psikologi anak yang kemudian berakibat bagi perkembangan mental anak, ataukah akan berpengaruh pada pendidikan anak sebagai akibat dari terputusnya tanggung jawab bersama oleh orang tuanya.

#### **F. Kerangka Fikir**

Dinamika penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama dilakukan dengan tujuan agar tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai.

---

<sup>45</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, op cit. h. 57.

Dinamika penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama harus sesuai dengan UU KDRT No. 23 Tahun 2004 serta UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan termasuk pula Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain itu dari konsep Islam dipakai sebagai landasan hukumnya adalah ayat yang terdapat dalam Alquran dan sunnah (hadis) dan beberapa pemikiran tentang pembahasan perkawinan yang merupakan hasil pemikiran dari tokoh hukum Islam (muftahid).

Hal tersebut wajib dilakukan agar tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tercapai, namun diasumsikan bahwa kurang efektifnya suatu aturan hukum karena dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam kerangka konseptual ini Penulis memberikan gambaran mengenai lingkup permasalahan dan bentuk pengantisipasi terhadap beberapa kasus perceraian yang diakibatkan karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang perkaranya ditangani oleh Pengadilan Agama Donggala yang lokasinya Wilayah hukumnya berada pada Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

Sebagai dasar hukum dari perkara tersebut diambil dari UU KDRT No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974, kemudian ketika ada yang membawa perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke Pengadilan Agama, maka dilakukanlah prosesi tata acara peradilan yang bersesuaian dengan regulasi yang terkait.

Dari segi sosial budayanya Penulis ingin mengungkapkan kenyataan yang terjadi terhadap perceraian yang diakibatkan karena kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana sebenarnya status kesamaan dalam hukum yang akan melindungi semua pihak pihak dalam rumah tangga itu, kemudian diungkapkan pula mengenai beberapa hal tentang kehidupan yang semestinya tercipta kerukunan dalam rumah tangga dengan bersandarkan kepada Alquran dan Hadis serta berbagai perangkat materi hukum yang telah diatur agar tercipta perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang implikasinya sebenarnya tidak akan pernah terjadi penistaan akan hak hidup tanpa penyiksaan dari salah satu pihak dalam rumah tangga itu, dari semua itu sebenarnya dapat dijadikan sebagai faktor pendukung untuk hidup rukun dan tentram.

Kemudian diungkapkan pula kenyataan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga itu disebabkan faktor penghambat yang disebabkan ketidaktahuan pihak-pihak yang bersengketa yang menyebabkan adanya penuntutan diantara mereka, lalu menyelesaikan perkaranya melalui Pengadilan agama dengan tanpa mengetahui pula mekanisme pelaksanaan bertata acara yang diatur pada saat mengajukan gugatan hingga perkara diputuskan.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada diagram kerangka konseptual sebagai berikut :

### Diagram Kerangka Konseptual





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau berbagai hubungan variabel-variabel.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari objek penelitian, yang akan menghubungkan satu variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan suatu deskriptif tentang objek penelitian.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, metode penelitian deskriptif banyak dilakukan oleh para peneliti karena ada dua alasan: Pertama, dari pengamatan empiris telah terdapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.<sup>2</sup>

Disamping kedua alasan tersebut di atas, penelitian deskriptif pada umumnya menarik bagi peneliti, karena bentuknya sederhana dan mudah dipahami, tanpa memerlukan teknik statistik yang kompleks dengan data-data kuantitatif yang butuh hitung-hitungan matematis yang mesti akurat.

---

<sup>1</sup>Surya Putra N. Awangga, *Desain Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Pyramid Publisher, 2007), h. 22

<sup>2</sup>Sukardi, *Metode Penelitian, cetakan I*, (Jakarta: Bumi Aksara.), h. 175

Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada kualitatif<sup>3</sup> dalam ranah Yuridis. Maksudnya adalah penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian yang berupaya menganalisa secara mendalam dan menyeluruh dari segala segi (komprehensif) serta terpadu (holistik). Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Maleong bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.<sup>4</sup>

Sedangkan Yuridis dimaksudkan untuk mengungkap sisi hukum yang termaktub dalam tema penelitian yang berkaitan dengan kasus perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga dan yang berkenaan dengan kondisi sosio kultural masyarakat dalam wilayah hukum yang terkait permasalahan dalam tema judul tesis ini.

Untuk memberikan penekanan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian sebagaimana yang diungkapkan oleh Mathew B. Miles dan A. Michel Huberman yang mengatakan bahwa:

hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif adalah, data muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, penyuntingan dan alih tulis), tetapi analisis kualitatif

---

<sup>3</sup> Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1993, h. 209

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan III, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1999), h. 86

tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperlukan”.<sup>5</sup>

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena fokus penelitian adalah bersifat mengetahui dan mengungkap dinamika penerapan penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Donggala.

### ***B. Rancangan Penelitian***

Berdasarkan jenis dan sifat objek yang diteliti, maka rancangan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah rancangan studi deskripsi, selanjutnya sebagaimana yang diungkapkan oleh S. Margono bahwa: ‘rancangan pada dasarnya merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan yang matang tentang hal-hal yang dilakukan. Ia merupakan landasan berpijak serta dapat pula dijadikan dasar penelitian’.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan studi kasus dan penelitian lapangan yakni Penulis berusaha menguraikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu, terutama mengenai persoalan yang berkenaan dengan kasus perceraian yang diakibatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan salah satu diantara pihak-pihak yang ada dalam rumah tangga.

---

<sup>5</sup>Matthew B. Miles, Dkk, *Analisis Data Kualitatif*. Cet. I (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 15-16.

<sup>6</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 100



Penulis membagi rancangan penelitian ini dengan dua tahapan yaitu:

1. Tahap orientasi yaitu Penulis melakukan pengenalan lokasi dan pengumpulan data secara umum dengan cara observasi dan wawancara secara terbuka untuk memperoleh informasi yang luas mengenai nilai-nilai umum tentang obyek penelitian, dari sejumlah key informan dan informan didapatkan informasinya, lalu kemudian dianalisis untuk menemukan hal-hal yang urgen, menarik, penting dan berguna untuk diteliti secara mendalam.

2. Tahap eksplorasi yaitu Penulis lebih memperjelas fokus sehingga dapat mengumpulkan data yang lebih terarah dan lebih spesifik, dan menghubungkan seluruh data yang didapatkan lalu dianalisis secara mendalam dan bermakna.

### ***C. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Donggala, tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Donggala dengan pertimbangan bahwa ada kasus yang terjadi dan ditangani oleh Pengadilan tersebut.

Penulis memilih lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

Pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Donggala adalah pengadilan yang dikhususkan bagi perkara perdata umat Islam yang berada di kawasan kabupaten donggala dan sekitarnya termasuk pula di dalamnya terdapat kabupaten Sigi yang baru mekar dari kabupaten Donggala.

Selain itu yang kedua adalah lokasi penelitian ini menjadi strategis untuk diteliti karena merupakan pengadilan penyanggah dari pengadilan tingkat banding yang berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai wilayah kerja lebih luas dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kota Palu yang nota benenya penduduk muslimnya mayoritas.

#### ***D. Sumber Data***

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari informan di tempat penelitian. Bahan-bahan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan berbagai tanggapan informan, melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder yaitu data yang isinya membahas atau menjelaskan mengenai bahan data primer. Bahan data sekunder yang dikumpulkan meliputi, buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Bahan data sekunder dalam penelitian ini yaitu pendapat para ahli bidang Hukum yang dapat ditemukan pada jurnal ilmiah, artikel Hukum dan Hukum Islam di majalah, tesis yang menjadi buku, makalah seminar, situs pendidikan di media internet, situs koran online di media internet, surat kabar, majalah Hukum dan sebagainya, kemudian bahan data primer dan sekunder di susun secara sistematis berdasarkan pokok pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini.

### ***E. Instrumen penelitian***

Terdapat dua metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) atau dapat dinyatakan sebagai studi dokumen yaitu mempelajari dan membaca buku-buku yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu tentang perkara perceraian dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam rangka memperoleh landasan teoritik maupun konseptual sebagai dasar hukum dalam melakukan penelitian ini

2. Pengamatan (observasi), yaitu: metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti, teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad :

yaitu tehnik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik itu pengamatan dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan”.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penglihatan dan pendengaran untuk menangkap gejala yang diamati. Hasil dari pengamatan tersebut yang selanjutnya di analisis oleh penulis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun tujuan pengamatan yang dilakukan adalah mencatat atau mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti.

---

<sup>7</sup>Winarno Surakhman, *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet. VI, (Bandung: Tarsito, 1978), h. 155

3. Wawancara atau Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis menulis untuk catatan reflektif dan pedoman wawancara, pedoman wawancara disusun dengan tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikunto:

Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.<sup>8</sup>

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan jalan komunikasi melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan objek atau sumber data. Wawancara sangat dibutuhkan dalam hal ini karena adanya informasi yang tidak dapat di amati hanya melalui observasi ataupun alat lain.

Dari poin 2 dan 3 yang telah disebutkan di atas dapat dinyatakan sebagai studi lapangan (*field research*), yaitu menelaah, meneliti dan menganalisa dinamika penyelesaian perkara perdata perceraian dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi yaitu:

---

<sup>8</sup> Suhasimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu pendekatan Praktik*, Ed. II, cetakan IX, (Jakarta : Rineke Cipta, 1993), h. 209

1. Telaah deduktif, yaitu metode analisis data yang bertolak dari data yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Telaah induktif, yaitu metode analisis data yang bertolak dari data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.
3. Telaah komparatif, yaitu membandingkan jenis data yang sama atau pun berbeda yang akan ditarik kesimpulan ketika telah memenuhi semua unsur kriteria yang diperbandingkan satu sama lainnya.<sup>9</sup>

Selain metode di atas secara khusus untuk mencapai tujuan penelitian yang maksimal, penulis berusaha untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan. Dalam upaya penulis untuk menganalisa data menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Matthew B. Milles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>10</sup>

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi

---

<sup>9</sup>Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997) h. 36

<sup>10</sup>Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, cet. I, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15-16

penelitian itu, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa-basi dan sejenisnya.

2. Penyajian data, yaitu penyajian data yang telah direduksi dalam model-medel tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Matthew B.Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Alur penting yang kedua dari bagian analisa adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.<sup>11</sup>

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan :

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dengan permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari preposisi.<sup>12</sup>

Dalam memverifikasi data, Penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 7

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 19

observasi, wawancara dan dokumentasi dipilih mana sesuai dengan judul dan menghindari yang tidak perlu.

Begitu banyaknya keterangan data dari informan yang penulis dapatkan sehingga perlu diseleksi lagi, kemudian pernyataan yang bersifat umum dari informan disimpulkan secara sederhana atau bersifat khusus, sedangkan data yang terperinci digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan umum dan demikian pula dengan data yang kelihatannya berbeda atau kontra akan disimpulkan dengan cara mencari persamaannya.

### ***G. Pengujian dan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lexy J. Maleong yaitu: 'keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.<sup>13</sup>

Dalam pengecekan keabsahan data ini Penulis melakukannya dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 171

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 178

Penggunaan metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data dengan pengecekan kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan sebelumnya. Maksud dari kesesuaian itu adalah kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Sejarah dan Wilayah Kabupaten Donggala

Kabupaten Donggala adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah pada wilayah Republik Indonesia. Ibu kota kabupaten Donggala terletak di Banawa. Sementara Kabupaten ini memiliki luas wilayah 12.890,8 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 466.898 jiwa (2007), di mana pada saat itu wilayah Kabupaten Sigi masih merupakan wilayah otonomi yang sama dengan Kabupaten Donggala.

Sebelum ditaklukkan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1904 wilayah Kabupaten Donggala adalah wilayah Pemerintah raja-raja yang berdiri sendiri-sendiri yaitu:

1. Kerajaan Palu
2. Kerajaan Sigi Dolo
3. Kerajaan Kulawi
4. Kerajaan Biromaru
5. Kerajaan Banawa
6. Kerajaan Tawaili
7. Kerajaan Parigi
8. Kerajaan Moutong.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>[http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=140&Itemid=157](http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=157) diakses tanggal 21 Maret 2013

Dalam perkembangan selanjutnya daerah ini yang merupakan bagian dari wilayah Sulawesi Tengah dijadikan afdeling Donggala yang meliputi:

A. Onder afdeling Palu terdiri dari;

1. landschap Kulawi di Kulawi
2. landschap Sigi Dolo di Biromaru
3. landschap Palu di Palu

B. Onder afdeling Parigi terdiri dari:

1. landschap Parigi di Parigi
2. landschap Moutong di Moutong

C. Onder afdeling Donggala terdiri dari:

1. landschap Banawa di Donggala
2. landschap Tawaili di Tawaili

D. Onder afdeling Toli-toli<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 1952, daerah Sulawesi Tengah terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, wilayahnya meliputi bekas onder afdeling Palu, Donggala, Parigi dan Toli-toli Kabupaten Poso, wilayahnya meliputi bekas onder afdeling Poso, Bungku/Mori dan Luwuk.

Tanggal 12 Agustus ditetapkan sebagai tahun lahirnya Kabupaten Donggala yang diperingati setiap tahun, dengan PP No. 33 tahun 1952, juga disertai dengan pembentukan lembaga pemerintahan daerah serta badan-badan perlengkapan

---

<sup>2</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Donggaladiakses](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Donggaladiakses) tanggal 21 Maret 2013

lainnya yaitu Pembentukan DPRDS yang didasarkan undang undang NIT no. 44 tahun 1950 Pembentukan dinas-dinas yang terdiri dari Pertanian Kehutanan Perikanan Darat Kehewanan Pengajaran Pekerjaan umum Kesenian.

Selanjutnya berdasarkan UU no. 29 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tkt. II di Sulawesi Tengah, sekaligus merupakan pemekaran pertama dimana daerah Kabupaten Donggala dibagi menjadi dua kabupaten daerah tkt. II yaitu Kabupaten Daerah tkt. II Donggala Kabupaten Daerah tkt. II Toli-toli.

Sejak berdirinya Kabupaten Donggala, setidaknya sampai dengan tahun 1999, Kabupaten Donggala menjadikan Kota Palu sebagai ibukota kabupaten yang nota bene juga adalah ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan sejak tahun 1978 ketika Palu dikukuhkan menjadi kota administratif (cikal bakal kota madya/pemekaran kedua) maka Kota Palu saat itu harus menyanggah 3 fungsi yaitu sebagai Kota Administratif Palu, sebagai ibu kota Kabupaten Donggala, dan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 1999, ibukota Kabupaten Donggala resmi dipindahkan dari Kota Palu, dikembalikan ke Kota Donggala sendiri yang berjarak 34 km dari Kota Palu.

Pada tahun 2002 kembali terjadi pemekaran di Kabupaten Donggala, sesuai UU no. 10 thn 2002 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, dengan memboyong 6 dari 18 kecamatan di Kabupaten Donggala saat itu.

---

<sup>3</sup>[http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=140&Itemid=157](http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=157)(Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Bulan November Tahun 2011) diakses tanggal 21 Maret 2013

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pula pemekaran kecamatan di Kabupaten Donggala, dari 12 kecamatan sepeninggal Kabupaten Parigi Moutong, menjadi 21 kecamatan sampai saat itu (2002).<sup>4</sup>

Secara administratif, pada tahun 2009 Kabupaten Donggala terbagi atas 16 kecamatan, 141 desa dan 9 kelurahan dengan luas wilayah 4.764,83 Km<sup>2</sup> atau 6,98 persen dari total luas wilayah Sulawesi Tengah. Kondisi topografis Kabupaten Donggala sangat bervariasi dengan kelerengan yang beragam. Puncak tertinggi pada kawasan tenggara kabupaten dengan ketinggian di atas  $\pm 700$  m dari permukaan laut.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Donggala mencapai 277.236 jiwa yang terdiri dari laki-laki 142.179 jiwa dan perempuan 135.057 jiwa, dengan tingkat sex ratio 105 dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai 57 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Potensi daerah Kabupaten Donggala adalah pada sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian daerah dan merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Donggala yaitu sebesar 43,95 persen. Kabupaten Donggala memiliki kekayaan hayati yang beragam, salah satunya adalah jenis sayur-sayuran yang tumbuh subur di wilayah ini.

Produksi sayur-sayuran di daerah ini cukup besar. Bawang merah merupakan komoditi sayuran dengan total produksi terbesar yakni 52.603 ton,

---

<sup>4</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Donggala](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Donggala) diakses tanggal 21 Maret 2013

disusul lombok dengan total produksi 47.509 ton, tomat dengan total produksi 33.053 ton, kacang-kacangan dengan total produksi terbesar yakni 30.137 ton, terung dengan total produksi terbesar yakni 28.823 ton dan ketimun dengan total produksi terbesar yakni 22.156 ton dengan total produksi terbesar yakni 52.603 ton.<sup>5</sup>

Komoditas perkebunan yang dikembangkan dan merupakan produk andalan Kabupaten Donggala antara lain kelapa, kakao, kelapa sawit, cengkeh, kopi, lada dan jambu mete. Pada tahun 2009 komoditas yang paling banyak dihasilkan adalah kelapa sebesar 47.482 ton dengan luas areal tanam 27.712 Ha, produksi kakao mencapai 30.828 ton dengan luas areal tanam 30.005 Ha, produksi kelapa sawit mencapai 24.860 ton dengan luas areal tanam 6.837 Ha, produksi cengkeh mencapai 907 ton dengan luas areal tanam 4.229 Ha, produksi kopi mencapai 371 ton dengan luas areal tanam 772 Ha dan produksi lada mencapai 202 ton dengan luas areal tanam 331 Ha dan produksi jambu mete mencapai 163 ton dengan luas areal tanam 1.468 Ha.

Kabupaten Donggala memiliki areal hutan seluas 708.078 Ha, terdiri dari hutan lindung 232.995 Ha, hutan produksi biasa tetap 11.624 Ha, hutan produksi terbatas 294.427 Ha, hutan yang dapat dikonversi 33.296 Ha, hutan suaka alam dan hutan wisata 135.736 Ha. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Donggala mencapai 2,40 persen. Jenis kayu yang dihasilkan

---

<sup>5</sup>[http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=140&Itemid=157](http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=157)(Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Bulan November Tahun 2011) diakses tanggal 21 Maret 2013

terdiri dari meranti, palapi, nyatoh, motoa, cempaka, dan rimba campuran, selain itu terdapat juga rotan dan damar.

Populasi ternak yang terbesar di Kabupaten Donggala adalah sapi dan kambing. Pada tahun 2009, ternak sapi populasinya mencapai 44.432 ekor, ternak kuda dengan populasi 622 ekor, ternak kerbau dengan populasi 398 ekor, ternak kambing dengan populasi 41.796 ekor, ternak babi dengan populasi 28.215 ekor dan ternak domba dengan populasi 2.435 ekor. Sedangkan ternak ayam kampung, pada tahun 2009 populasinya mencapai 448.265 ekor dengan produksi telur sebesar 268,96 ton, populasi ayam pedaging 1.424.002 ekor, populasi ayam ras petelur sebanyak 353.581 ekor dengan produksi sebesar 3.981,61 ton dan populasi ternak itik 7.380 ekor dengan produksi telur sebesar 116,99 ton.<sup>6</sup>

Pada tahun 2009 produksi perikanan tangkap laut dan umum mencapai 27.113,50 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 54.016.000.000,-, produksi perikanan budidaya tambak mencapai 489,60 ton dengan nilai produksi Rp. 23.693.000.000,-, produksi perikanan budidaya laut mencapai 1.293,7 ton dengan nilai produksi Rp. 55.627.000.000,- dan produksi perikanan budidaya kolam mencapai 2.781 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 55.627.000.000,-.

Sementara untuk sektor Pariwisata kabupaten Donggala adalah sebuah kota tua yang terletak  $\pm$  34 Km timur laut dari Kota Palu. Dengan arsitektur Belanda yang masih menghiasi kota, Donggala juga mempunyai banyak obyek wisata yang

---

<sup>6</sup>[http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=140&Itemid=157](http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=157)(Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Bulan November Tahun 2011) diakses tanggal 21 Maret 2013

sangat indah dan menarik untuk dikunjungi, antara lain Pantai Tanjung Karang, Pusentasi (kolam air asin), Air Terjun Pawelua, Pulau Pasoso, dll. Selain wisata daratan, perairan Donggala juga memiliki pemandangan bawah laut yang sangat indah dan baik untuk lokasi penyelaman (diving) antara lain di: Runeh Bupoti, Enu, Pasi pome, Batu Suya dan Atol Besar.

Wisatawan yang berkunjung juga dapat membeli oleh-oleh berupa Kain Tenun Donggala, dengan sentra produksinya antara lain di Desa Towale. Kain tenun Donggala atau sarung sutra Donggala merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional Kabupaten Donggala yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Dikatakan tenun tradisional, karena proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan peralatan yang tradisional dilakukan oleh kaum perempuan di Donggala.<sup>7</sup>

Untuk data terakhir jumlah penduduk kabupaten Donggala pada Tahun 2011 adalah sejumlah 282.752 jiwa yang terdiri dari Laki-laki sejumlah 145.128 jiwa sementara untuk perempuan sejumlah 137.624 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1%, sementara kepadatan penduduk 54 jiwa per km<sup>2</sup>.

## 2. Pengadilan Agama Donggala

Pengadilan Agama Donggala adalah pengadilan yang terbentuk seiring dengan terbentuk atau mekarnya kabupaten Donggala sebagai kabupaten yang otonom di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum adanya Pengadilan Agama

---

<sup>7</sup>[http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=140&Itemid=157](http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=157)(Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Bulan November Tahun 2011) diakses tanggal 21 Maret 2013

Donggala semua perkara perdata khusus yang bersangkutan paut diantara masyarakat muslim di kabupaten Donggala dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kota Palu. Di mana dalam sejarahnya Pengadilan Agama Kota Palu sendiri telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajahan Belanda, sudah dikenal adanya “GADHI” di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam menyangkut hubungan perkawinan seperti nikah, talaq, rujuk, mawaris dan lainnya diselesaikan lewat QADHI atau Mahkamah syar’i yang sekarang disebut sebagai Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Donggala secara resmi berdiri berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 85 tahun 1996. Selain keputusan Presiden tersebut landasan hukum berdirinya Pengadilan Agama Donggala adalah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 303 tahun 1990 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 250 tahun 1997, serta KMA Nomor 084/SK/II/1002 Jo. KMA 025/SK/IV/1997. Dengan lengkapnya landasan hukum tersebut, maka dimulailah dilaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Donggala.<sup>8</sup>

Dengan beberapa landasan hukum tersebut sehingga resmilah pelaksanaan dan penyelenggaraan hukum tata acara peradilan agama yang mewilayahi kabupaten Donggala yang pada saat itu belum terbagi kepada pengadilan agama

---

<sup>8</sup>Drs. H. Rahmatullah, MH., (Ketua Pengadilan Agama Donggala), “Wawancara” Oleh Penulis pada tanggal 04 Maret 2013 di Ruang Ketua Pengadilan Agama Donggala



Parigi dan wilayah Sigi, karena memang masih masuk dalam daerah Kabupaten Donggala.

Pengadilan Agama Donggala diresmikan pada tanggal 3 Juli 1997 berdasarkan Keputusan Presiden di atas. Pengadilan Agama Donggala pada waktu itu mewilayahi seluruh kabupaten Donggala yang pada saat itu terdiri dari 18 Kecamatan dan pada saat itu juga terpisah dari Pengadilan Agama Kota Palu yang disebabkan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Palu sebagai kota yang berdiri sendiri tanpa terpengaruhi oleh wilayah Kabupaten Donggala seperti ketika Kota Palu masih berstatus Kota Administratif, dan sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Gedung yang pertama kali digunakan untuk berkantornya dan sebagai tempat berperkara bertempat di jalan Datu Adam No 17 Paluberukuran 10 x 15 meter dan terdiri dari ruang Ketua, ruang Hakim, ruang Tunggu, ruang Kepaniteraan dan Kesekretariatan, ruang Pengacara ditambah dengan ruang kamar mandi dan petersuan. Gedung ini digunakan hanya untuk sementara dikarenakan ketika diterbitkannya SK Penyelenggaraan Pengadilan Agama Donggala, di Kota Donggala belum tersedia bangunan tersendiri untuk digunakan sebagai tempat penyelenggaraan peradilan, sehingga kantornya masih berada di Kota Palu dan baru sebuah rumah yang dikontrakkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Mahfudz, SH, (Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Donggala), “*Wawancara*” Oleh Penulis pada tanggal 04 Maret 2013 di Ruang Adminstrasi Pengadilan Agama Donggala

Setelah hampir  $\pm$  selama 6 tahun lamanya berkedudukan di kota Palu, maka pada tahun 2003 Kantor Pengadilan Agama Donggala dipindahkan ke Kota Donggala dan mewilayahi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala sebanyak 21 Kecamatan, sekaligus juga termasuk wilayah kabupaten Parigi Moutong yang pada saat itu sebanyak 8 kecamatan dengan luas wilayahnya secara keseluruhan berkisar 16.703,56 km<sup>2</sup>.<sup>10</sup>

Ketika Pengadilan Agama Donggala pertama kali diresmikan yang menjadi Ketua Pengadilannya yaitu Bapak Drs. Dadi Suryadi, SH., MH lalu dilanjutkan oleh Drs. H.M. Yusuf kemudian yang sekarang bertugas yaitu bapak Drs. H. Rahmatullah, MH, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Donggala  
dari Tahun 1997 sampai dengan 2013

No	NAMA	TAHUN
1	Drs. Dadi Suryadi, SH., MH	1997 s/d 2004
2	Drs. H.M. Yusuf	2004 s/d 2008
3	Drs. H. Rahmatullah, MH	2008 s/d sekarang

Sumber data: Pengadilan Agama Donggala, Maret 2013

---

<sup>10</sup>Mahfudz, SH, (Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Donggala), “Wawancara” Oleh Penulis pada tanggal 04 Maret 2013 di Ruang Administrasi Pengadilan Agama Donggala

Pengadilan Agama Donggala mempunyai Visi adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Donggala yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung”.<sup>11</sup> Sementara Misinya adalah ;

- a. Menjaga kemandirian Peradilan Agama Donggala.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Donggala.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Donggala.<sup>12</sup>

Secara umum keterlibatan Pengadilan Agama Donggala sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena sangat membantu proses dalam penyelesaian perkara perceraian.

***B. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga Mengakibatkan Perceraian di Pengadilan Agama Donggala.***

Membahas mengenai penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diperlukan berbagai pendekatan dan dibutuhkan sarana-sarana berupa ilmu-ilmu sosial lainnya. Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 menempuh perjalanan panjang mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga keputusan hakim. Masing-masing tahap saling terkait satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen, yaitu penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukumnya.

---

<sup>11</sup><http://pa-donggala.go.id/> diakses tanggal 21 Maret 2013

<sup>12</sup><http://pa-donggala.go.id/> diakses tanggal 21 Maret 2013

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang rumit dan kompleks. Jumlah kasus ini sangat besar, tetapi yang tercatat hanya sedikit. Datanya ibarat gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Hal itu ada banyak alasan mengapa sulit mendata jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, pertama, karena terjadinya didalam rumah tangga sehingga sulit untuk memantau dan kemudian terabaikan; kedua, anggapan masyarakat yang memandang persoalan ini sebagai masalah internal keluarga atau persoalan privat sehingga tidak memerlukan campur tangan pihak lain; ketiga, sebagian masyarakat secara langsung maupun tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga karena dianggap sebagai bunga-bunga dalam rumah tangga. Akibatnya kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang lumrah dan biasa dimasyarakat.

Sejauh penelitian Penulis di lapangan bahwa penyelesaian perkara perceraian dengan dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan Agama Donggala sudah berjalan sesuai dengan prosedur pengadilan yang ditetapkan. Beberapa kasus perkara perceraian selama 2013 saja telah mencapai angka untuk cerai talak sejumlah 38 perkara sementara untuk cerai gugat sebanyak 107 perkara sehingga jika dijumlahkan selama tahun 2013 yang baru berjalan sekitar 5 bulanan saja antara bulan Januari sampai dengan Mei 2013 di Pengadilan Agama Donggala telah terdaftar perkara perceraian sebanyak 145 perkara perceraian.

Perkara perceraian dengan dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau yang sejenisnya dapat dilihat dari tabel yang ditampilkan melalui situs internet Mahkamah Agung untuk wilayah hukum Pengadilan Agama

Donggala dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Rekap Faktor Penyebab Perceraian selama Bulan Januari s/d Mei 2013<sup>13</sup>

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Total
1.	Poligami Tidak Sehat	- Perkara
2.	Krisis Akhlak	24 Perkara
3.	Cemburu	8 Perkara
4.	Kawin Paksa	- Perkara
5.	Ekonomi	9 Perkara
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	3 Perkara
7.	Kawin Di Bawah Umur	- Perkara
8.	Kekejaman Jasmani	3 Perkara
9.	Kekejaman Mental	- Perkara
10.	Dihukum	- Perkara
11.	Cacat Biologis	- Perkara
12.	Politis	- Perkara
13.	Gangguan Pihak Ketiga	8 Perkara
14.	Tidak Ada Keharmonisan	30 Perkara
15.	Lain-Lain	- Perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>85 Perkara</b>

Dari data tersebut menggambarkan bahwa perkara perceraian pada bulan Januari hingga Mei dengan dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan Agama Donggala jika diakumulasikan kedalam beberapa penyebab yang setara dengan kekerasan dalam rumah tangga maka terdapat 60 perkara

<sup>13</sup><http://infoperkara.badilag.net/> (Mahkamah Agung RI) diakses tanggal 07 Juni 2013

selama tahun 2013. Walaupun yang khusus berkenaan secara langsung kepada kekerasan dalam rumah tangga hanya terdapat 3 perkara dari 85 perkara yang didaftarkan oleh pasangan yang akan melakukan perceraian.

Selanjutnya dari data perkara yang masuk tersebut di atas, di bawah ini dapat dilihat berapa banyak perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Donggala selama tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



Tabel 3  
 Penyelesaian Kasus Perkara Yang Diputus Oleh Pengadilan Agama Donggala  
 Bulan Januari Tahun 2013<sup>14</sup>

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Jenis Putusan
1.	0287/Pdt.G/2012/PA.Dgl	Cerai Talak	Kamis, 03 Januari 2013	DIKABULKAN
2.	0226/Pdt.G/2012/PA.Dgl	Cerai Talak	Selasa, 08 Januari 2013	DIKABULKAN
3.	0254/Pdt.G/2012/PA.Dgl	Cerai Talak	Selasa, 08 Januari 2013	DIKABULKAN
4.	0260/Pdt.G/2012/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 10 Januari 2013	DIKABULKAN
5.	0279/Pdt.G/2012/PA.Dgl	Cerai Talak	Selasa, 15 Januari 2013	DITOLAK
6.	0004/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 17 Januari 2013	DICORET DARI REGISTER
7.	0285/Pdt.G/2012/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 21 Januari 2013	DIKABULKAN
8.	0235/Pdt.G/2012/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 23 Januari 2013	DIKABULKAN
9.	0005/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 28 Januari 2013	DIKABULKAN
10.	0007/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 28 Januari 2013	DIKABULKAN
11.	0008/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 28 Januari 2013	DIKABULKAN
12.	0009/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 29 Januari 2013	DIKABULKAN
13.	0012/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 29 Januari 2013	DIKABULKAN

<sup>14</sup><http://infoperkara.badilag.net/> (Mahkamah Agung RI) diakses tanggal 07 Juni 2013

Pada bulan Januari 2013 perkara perceraian sebanyak 11 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Donggala dari jumlah kasus sebanyak 13 perkara, yang 1 perkara ditolak dan yang 1 perkara lainnya dicoret dari register. Sementara untuk bulan Februari dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu:

Tabel 4  
Penyelesaian kasus perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Donggala  
Bulan Februari Tahun 2013 <sup>15</sup>

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Jenis Putusan
1.	0289/Pdt.G/2012/PA.Dgl	Cerai Talak	Selasa, 05 Februari 2013	DIKABULKAN
2.	0010/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 05 Februari 2013	DIKABULKAN
3.	0011/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 05 Februari 2013	DIKABULKAN
4.	0013/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 05 Februari 2013	DIKABULKAN
5.	0014/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 05 Februari 2013	DIKABULKAN
6.	0015/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 05 Februari 2013	DIKABULKAN
7.	0016/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 07 Februari 2013	DIKABULKAN
8.	0017/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 07 Februari 2013	DIKABULKAN
9.	0018/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Kamis, 07 Februari 2013	DIKABULKAN
10.	0020/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Kamis, 07 Februari 2013	DIKABULKAN
11.	0024/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai	Kamis, 07	DIKABULKAN

<sup>15</sup><http://infoperkara.badilag.net/> (Mahkamah Agung RI) diakses tanggal 07 Juni 2013



		Gugat	Februari 2013	
12.	0025/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 07 Februari 2013	DIKABULKAN
13.	0001/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Rabu, 13 Februari 2013	DIKABULKAN
14.	0021/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Rabu, 13 Februari 2013	DIKABULKAN
15.	0027/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 13 Februari 2013	DIKABULKAN
16.	0290/Pdt.G/2012/PA.Dgl	Cerai Talak	Kamis, 14 Februari 2013	DIKABULKAN
17.	0019/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Senin, 18 Februari 2013	DICORET DARI REGISTER
18.	0300/Pdt.G/2012/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 20 Februari 2013	DIKABULKAN
19.	0023/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Rabu, 20 Februari 2013	DIKABULKAN
20.	0029/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 20 Februari 2013	DIKABULKAN
21.	0034/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 26 Februari 2013	DIKABULKAN
22.	0040/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 26 Februari 2013	DIKABULKAN
23.	0041/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 26 Februari 2013	DIKABULKAN
24.	0042/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 26 Februari 2013	DIKABULKAN
25.	0043/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 26 Februari 2013	DIKABULKAN
26.	0044/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 26 Februari 2013	DIKABULKAN
27.	0047/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Selasa, 26 Februari 2013	DIKABULKAN
28.	0048/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai	Selasa, 26	DIKABULKAN

		Talak	Februari 2013	
29.	0050/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 26 Februari 2013	DIKABULKAN
30.	0006/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 27 Februari 2013	DIKABULKAN
31.	0022/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 27 Februari 2013	DIKABULKAN
32.	0035/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 27 Februari 2013	DIKABULKAN
33.	0036/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 27 Februari 2013	DIKABULKAN
34.	0037/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 27 Februari 2013	DIKABULKAN

Pada bulan Februari 2013 perkara perceraian sebanyak 33 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Donggala dari jumlah kasus sebanyak 34 perkara, yang 1 perkara dicoret dari register. Dengan melihat ini maka disimpulkan bahwa pada bulan januari lebih sedikit jumlah perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Donggala jumlah yang diputus meningkat sampai 200% pada bulan Februari jika dibandingkan dengan bulan Januari 2013. Sementara untuk bulan Maret dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu:

Tabel 5  
Penyelesaian kasus perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Donggala  
Bulan Maret Tahun 2013<sup>16</sup>

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Jenis Putusan
1.	0052/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Perwalian	Senin, 04 Maret 2013	DIKABULKAN
2.	0001/Pdt.P/2013/PA.Dgl	Isbat Nikah	Rabu, 06 Maret 2013	DIKABULKAN
3.	0002/Pdt.P/2013/PA.Dgl	Isbat Nikah	Rabu, 06 Maret 2013	DIKABULKAN
4.	0053/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 06 Maret 2013	DIKABULKAN
5.	0054/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 06 Maret 2013	DIKABULKAN
6.	0055/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 06 Maret 2013	DIKABULKAN
7.	0056/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Rabu, 06 Maret 2013	DIKABULKAN
8.	0026/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 07 Maret 2013	DIKABULKAN
9.	0030/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Kamis, 07 Maret 2013	DIKABULKAN
10.	0049/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Kamis, 14 Maret 2013	DIKABULKAN
11.	0003/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Penguasaan Anak	Selasa, 19 Maret 2013	DICORET DARI REGISTER
12.	0028/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 20 Maret 2013	DIKABULKAN
13.	0045/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 25 Maret 2013	DIKABULKAN
14.	0046/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Senin, 25 Maret 2013	DIKABULKAN

<sup>16</sup><http://infoperkara.badilag.net/> (Mahkamah Agung RI) diakses tanggal 07 Juni 2013

Pada bulan Maret 2013 perkara perceraian sebanyak 13 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Donggala dari jumlah kasus sebanyak 14 perkara, yang 1 perkara dicoret dari register. Dengan melihat ini maka disimpulkan bahwa pada bulan Februari lebih banyak dibandingkan pada bulan Maret dengan jumlah perkara berkurang sekitar 20 perkara dari bulan sebelumnya tetapi masih lebih banyak jika dibandingkan dengan perkara di bulan Januari 2013. Sementara untuk bulan April dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu:

Tabel 6  
Penyelesaian kasus perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Donggala  
Bulan April Tahun 2013 <sup>17</sup>

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Jenis Putusan
1.	0064/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Senin, 01 April 2013	DIKABULKAN
2.	0065/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 01 April 2013	DIKABULKAN
3.	0066/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 01 April 2013	DIKABULKAN
4.	0068/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 01 April 2013	DIKABULKAN
5.	0083/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 01 April 2013	DIKABULKAN
6.	0070/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 02 April 2013	DIKABULKAN
7.	0073/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 02 April 2013	DIKABULKAN
8.	0074/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Selasa, 02 April 2013	DIKABULKAN

<sup>17</sup><http://infoperkara.badilag.net/> (Mahkamah Agung RI) diakses tanggal 07 Juni 2013

9.	0039/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 04 April 2013	DIKABULKAN
10.	0061/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 04 April 2013	DIKABULKAN
11.	0067/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 08 April 2013	DIKABULKAN
12.	0002/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 09 April 2013	DIKABULKAN
13.	0069/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 09 April 2013	DIKABULKAN
14.	0072/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 09 April 2013	DIKABULKAN
15.	0085/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 09 April 2013	DIKABULKAN
16.	0076/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Kamis, 11 April 2013	DIKABULKAN
17.	0078/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 11 April 2013	DIKABULKAN
18.	0079/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 11 April 2013	DIKABULKAN
19.	0080/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 11 April 2013	DIKABULKAN
20.	0081/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 11 April 2013	DIKABULKAN
21.	0082/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 11 April 2013	DIKABULKAN
22.	0084/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 16 April 2013	DIKABULKAN
23.	0058/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 17 April 2013	DIKABULKAN
24.	0077/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Senin, 22 April 2013	DIKABULKAN
25.	0087/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 24 April 2013	DIKABULKAN
26.	0038/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 25 April 2013	DIKABULKAN

27.	0060/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 25 April 2013	DIKABULKAN
28.	0093/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 29 April 2013	DIKABULKAN
29.	0094/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 29 April 2013	DIKABULKAN
30.	0095/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 29 April 2013	DIKABULKAN

Pada bulan April 2013 semua perkara perceraian yang masuk dan teregistrasi sebanyak 30 perkara telah diputus secara keseluruhan oleh Pengadilan Agama Donggala dari sehingga tidak ada satupun perkara yang ditolak maupun dicoret dari registrasi. Dengan melihat ini, maka disimpulkan bahwa pada bulan Maret lebih Sedikit dibandingkan pada bulan April dengan peningkatan sejumlah 16 perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Donggala dan hampir sama dengan perkara bulan Februari pada tahun 2013 ini.. Sementara untuk bulan Mei dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu:

Tabel 7  
Penyelesaian kasus perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Donggala  
Bulan Mei Tahun 2013<sup>18</sup>

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Jenis Putusan
1.	0032/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Rabu, 01 Mei 2013	DIKABULKAN
2.	0090/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 02 Mei 2013	DIKABULKAN
3.	0102/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 02 Mei 2013	DIKABULKAN
4.	0103/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai	Kamis, 02 Mei	DIKABULKAN

<sup>18</sup><http://infoperkara.badilag.net/> (Mahkamah Agung RI) diakses tanggal 07 Juni 2013

		Gugat	2013	
5.	0104/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 02 Mei 2013	DIKABULKAN
6.	0105/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Kamis, 02 Mei 2013	DIKABULKAN
7.	0051/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 06 Mei 2013	DIKABULKAN
8.	0092/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Senin, 06 Mei 2013	DIKABULKAN
9.	0075/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Selasa, 07 Mei 2013	DIKABULKAN
10.	0096/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Selasa, 07 Mei 2013	DIKABULKAN
11.	0097/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 07 Mei 2013	DIKABULKAN
12.	0101/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 13 Mei 2013	DIKABULKAN
13.	0108/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 15 Mei 2013	DIKABULKAN
14.	0062/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Kamis, 16 Mei 2013	DIKABULKAN
15.	0106/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 16 Mei 2013	DIKABULKAN
16.	0107/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 21 Mei 2013	DIKABULKAN
17.	0113/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 22 Mei 2013	DIKABULKAN
18.	0114/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Rabu, 22 Mei 2013	DIKABULKAN
19.	0115/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Rabu, 22 Mei 2013	DIKABULKAN
20.	0091/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Kamis, 23 Mei 2013	DIKABULKAN
21.	0109/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai	Kamis, 23 Mei	DIKABULKAN

		Gugat	2013	
22.	0110/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 23 Mei 2013	DIKABULKAN
23.	0111/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 23 Mei 2013	DIKABULKAN
24.	0112/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Kamis, 23 Mei 2013	DIKABULKAN
25.	0071/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 27 Mei 2013	DIKABULKAN
26.	0098/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 27 Mei 2013	DIKABULKAN
27.	0099/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 27 Mei 2013	DICABUT
28.	0100/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Senin, 27 Mei 2013	DIKABULKAN
29.	0139/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Talak	Senin, 27 Mei 2013	DICORET DARI REGISTER
30.	0033/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Selasa, 28 Mei 2013	DIKABULKAN
31.	0086/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 29 Mei 2013	DIGUGURKAN
32.	0117/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 29 Mei 2013	DIKABULKAN
33.	0118/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 29 Mei 2013	DIKABULKAN
34.	0119/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 29 Mei 2013	DIKABULKAN
35.	0120/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 29 Mei 2013	DIKABULKAN
36.	0121/Pdt.G/2013/PA.Dgl	Cerai Gugat	Rabu, 29 Mei 2013	DIKABULKAN

Pada bulan Mei 2013 perkara perceraian sebanyak 33 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Donggala dari jumlah kasus sebanyak 36 perkara,



yang 1 perkara dicoret dari register yang 1 perkara lainnya digugurkan dan 1 perkara lagi dicabut, sehingga tidak jadi disidangkan. Dengan melihat ini, maka disimpulkan bahwa pada bulan Mei ini kasus perkara perceraian mengalami peningkatan yang sangat besar dibandingkan 4 bulan sebelumnya yang berada hanya dibawah 33 perkara sementara bulan Mei ini terdapat 36 perkara perceraian walaupun ada 1 perkara yang tidak jadi di sidangkan, yang lainnya dicoret dari registrasi dan yang 1 lagi digugurkan oleh Pengadilan Agama Donggala.

Dari 5 bulan berjalan pada tahun 2013 yang terdapat 127 kasus perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Donggala dengan mendapat keputusan tetap oleh Pengadilan Agama Donggala sebanyak 120 perkara, sementara terdapat 1 perkara yang ditolak oleh Pengadilan Agama Donggala, ada 4 perkara yang dicoret dari registrasi, dan ada 1 perkara yang digugurkan oleh Pengadilan Agama Donggala serta ada 1 perkara pula yang dicabut oleh pasangan yang berperkara.

Data di atas menunjukkan jumlah angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Donggala sangat tinggi sehingga perlu peran serta semua pihak untuk mengatasinya, jangan sampai pasangan yang menikah tidak siap untuk berumah tangga ketika diawal berencana membangun kehidupan bersama mereka, lalu menyelesaikan semua urusan rumah tangga di pengadilan agama dengan cara perceraian apakah dengan cerai gugat atau dengan cerai talak.

Kemudian dari jumlah 127 kasus itu yang diputus sebanyak 120 kasus perkara terdapat 60 perkara yang dapat dikategorikan penyebabnya dikarenakan

adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah dipaparkan pada tabel nomor 1 sebelumnya. Sementara yang betul-betul perceraian yang disebabkan oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga menurut data dari Mahkamah Agung untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala terdapat hanya 3 kasus perkara saja.

Hal ini menunjukkan bahwa korban dari kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Agama Donggala sangat meningkat juga, jika dipakai data yang berjumlah 60 kasus. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami sampai tuntas dipersidangan, mereka lebih memilih menyelesaikan kasus perceraian dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dengan cara memproses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yang pada awalnya korban tersebut melaporkannya ke Kepolisian.

Dalam proses penanganan penyelesaian perkara perceraian dengan dalil kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama Donggala sesuai dengan sistem penegakan hukum di Indonesia yang berlaku.

Selanjutnya kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya awal kasus ini dibawah dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, menempatkan kepolisian sebagai ujung tombak pertama dalam setiap penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu sukses tidaknya proses tahap penuntutan, tahap persidangan hingga tahap eksekusi, sangat bergantung pula dalam tahap awal yaitu sukses tidaknya tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Terkait dengan hal tersebut, penulis menemukan bahwa ternyata dalam tahap efektifitas penyelesaian perkara perceraian dengan dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan Agama Donggala terdapat banyak laporan / pengaduan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak ditindak lanjuti secara profesional dan proporsional, dan hampir sebagian besar proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan sistem penegakan hukum di Indonesia yang prosesnya hanya diselesaikan atau hanya berhenti dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian karena diadakan perdamaian diantara suami isteri karena masing-masing masih saling cinta, isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada pihak yang berwajib hanya ingin memberikan suaminya efek jera, sehingga hanya ingin perkaranya sampai di kepolisian saja, dan tidak ingin dilanjutkan dikejaksaan apalagi sampai mendapatkan putusan pengadilan yang memerintahkan suaminya untuk ditahan.

Terlebih lagi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 (2) dan Pasal 46 merupakan delik aduan, yang mana jika korban dalam hal ini seorang isteri atau suami tidak melakukan aduan atau menarik laporannya maka perkara tersebut tidak dapat diteruskan. sebagai konsekuensi logis terhadap delik aduan yang terdapat dalam Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 Ayat (2) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara hukum diperbolehkan oleh Undang-

Undang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan berhak untuk mencabut kembali pengaduannya tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 75 KUHP, namun upaya mencabut kejumpali pengaduan tersebut sayogyanya dilaksanakan sesuai asas proporsional dan berkeadilan.

Kasus perkara perceraian dengan akumulasi dalil kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh pihak pengadilan Agama Donggala selama Lima bulan terakhir dari bulan Januari sampai dengan Mei Desember tahun 2013 sebanyak 60 perkara, yang walaupun data yang real untuk kekerasan dalam rumah tangga hanya terdapat 3 perkara saja.

Melihat adanya perkara perceraian dengan dalil kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Donggala, maka masih dibutuhkan aparat hukum yang mempunyai wawasan luas, handal, sabar dan berpikiran jernih, agar dalam menghadapi masyarakat dapat mengendalikan emosional untuk tetap berada pada posisinya sebagai pemutus keadilan, sebab setiap kasus diupayakan untuk dapat damai.

Disamping itu, dibutuhkan pula adanya komitmen moral para aparat untuk lebih mendahulukan metode pendekatan persuasif dari para pendekatan hukum untuk membuktikan simpati warga masyarakat demi terjadinya ketertiban masyarakat.

Peran dari pengadilan agama serta instansi lain yang terkait dan warga masyarakat, perlu menjalin kerja sama yang harmonis untuk menetapkan ketertiban masyarakat sebagai salah satu persyaratan dalam infrastruktur pembangunan

disegala sektor kehidupan masyarakat. Mantapnya ketertiban masyarakat bukan hanya menciptakan ketenraman warga masyarakat, akan tetapi juga sekaligus dapat menjamin kelancaran proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam tahun 2013 kasus perceraian dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di ajukan ke pengadilan Agama Donggala semua putusan selesai. Untuk perkara-perkara perceraian akibat kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di pengadilan Agama Donggala majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tidak berjalan dengan maksimal.<sup>19</sup>

### ***C. Bentuk Penyelesaian Perkara Penyebab Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala***

Efektifitas penyelesaian perkara perceraian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Peradilan Agama dibatasi oleh kewenangan lembaga peradilan ini sebagai lembaga peradilan perdata keluarga. Hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Demikian ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dalam Hukum Islam kegiatan peradilan merupakan kegiatan *muamalah*, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan

---

<sup>19</sup>Kunti Nur Aini, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Donggala), "Wawancara" Oleh Penulis pada tanggal 04 Maret 2013 di Ruang Kerja Pengadilan Agama Donggala

manusia/manusia dengan masyarakat. Melaksanakan peradilan merupakan tugas suci karena lembaga peradilan mengemban tugas mulia untuk memerintahkan kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*munkar*).

Untuk melaksanakan itu harus ada pedoman berupa undang-undang dan aturan-aturan lainnya bagi para Hakim. Sebagai sebuah lembaga peradilan yang mengemban tugas berat tersebut, maka Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur asas-asas yang harus dipergunakan di dalam Peradilan Agama. Berdasarkan dengan hal tersebut maka faktor yang menjadi pendukung tentang penyelesaian perkara perceraian dengan dalil kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Agama Donggala adalah sebagai berikut:

1. Asas personalitas ke-Islaman;

Asas ini dimaksudkan dalam Pasal 1, Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan dengan Pasal 2 angka 1 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Peradilan Agama diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam dan untuk mengadili perkara-perkara tertentu.

2. Asas kebebasan;

Asas ini tersurat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Makna kebebasan kehakimandalam menjalankan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah:

- a) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya;
- b) Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicial*, artinya Hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan;
- c) Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan. Dalam hal ini sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tapi terbatas pada:
  - 1) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya;
  - 2) Menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang dibenarkan.
  - 3) Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin Ilmu Hukum, Hukum Adat, yurisprudensi dan melalui pendekatan realisme (yaitu mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, kesusilaan, kepatutan agama, dan kelaziman).

### 3. Asas wajib mendamaikan;

Asas ini termaktub dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 bahwa Pengadilan berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu sebelum sidang dan pada saat persidangan pertama sampai dengan sebelum perkara diputuskan. Pada prinsipnya hal ini dikembalikan kepada prinsip dalam Islam untuk menyelesaikan segala persengketaan dengan *islah*, musyawarah yang disepakati bersama demi kebaikan bersama.

4. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Asas ini tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biayaringan. Asas ini tidak dimaksudkan agar Hakim menyelesaikan perkara secara terburu-buru, yang penting cepat selesai. Namun pada prinsipnya agar Hakim dapat menyegerakan pemeriksaan atas perkara yang diajukan agar segera terdapat penyelesaian dengan pemeriksaan yang cermat dan tepat namun tidak berlarut-larut, yang dapat mengakibatkan banyak kerugian baik secara materiil dan non materiil.

Asas ini tidak lantas memperbolehkan Hakim untuk tidak menggali lebih jauh duduk perkara untuk mendapatkan kejelasan atas perkara yang diperiksa dan memahami secara keseluruhan kompleksitas dan keterkaitan dengan berbagai aspek dari para pihak yang bersengketa.

5. Asas persidangan terbuka untuk umum;

Asas ini ditegaskan pada Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang



mengatur lain atau Hakim karena mempertimbangkan alasan tertentu memutuskan persidangan tertutup untuk umum. Makna dari asas ini adalah agar Hakim dapat menyidangkan perkara secara transparan dan menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan serta melakukan pemeriksaan yang sewenang-wenang. Asas ini tidak berlaku untuk perkara perceraian.

6. Asas legalistis;

Asas ini menganut prinsip bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

7. Asas persamaan;

Asas persamaan atau *equality* serupa dengan hak legalistis bahwa kedudukan orang adalah sama di hadapan hukum. Sulaikin menjelaskan lebih lanjut tentang tiga patokan fundamental asas ini, yakni :

- a) Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau “*equal before the law*”;
- b) Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “*equal protection on the law*”; dan
- c) Mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum atau “*equal justice under the law*”.

8. Asas aktif memberi bantuan;

Asas ini tercatat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala

hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian sebagai suatu perkara perdata dalam proses pemeriksaannya di Pengadilan Agama membutuhkan suatu pembuktian mengenai kebenaran-kebenaran akan peristiwa yang dijadikan alasan oleh para pihak dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian, sedangkan mengenai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Umum, yaitu *Het Herzeine Indonesische Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechteesreglement Buitengewesten* untuk daerah luar Jawa, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut, maka dari itu proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga pun tidak akan terlepas dari kedua peraturan tersebut.

Kedudukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai peraturan khusus (*lex specialis*) sementara itu HIR dan RBG adalah sebagai peraturan yang

umum (*lex generalis*), sehingga dalam masalah pembuktian di Pengadilan Agama apabila Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah mengatur secara khusus maka dengan sendirinya HIR dan RBG tidak berlaku, akan tetapi bila pembuktian tersebut belum diatur secara khusus maka diberlakukan ketentuan-ketentuan umum dalam HIR dan RBG.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa beberapa alasan perceraian yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai secara substansial dengan konsep kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penjelasan mengenai proses pembuktian hanya dibatasi pada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya *juncto* Pasal 116 huruf a, Pasal 116 huruf b, Pasal 116 huruf d, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan perceraian karena “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, khusus dalam hal salah satu pihak berbuat zina maka pembuktiannya diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Peradilan Agama menyebutkan :

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak

mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah”;

- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahanya dengan cara yang sama.

Sumpah yang diperintahkan oleh Majelis Hakim dalam proses pembuktian tersebut disebut dengan sumpah pelengkap atau *suppletioir*, sumpah ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara. Sumpah tersebut memiliki peranan yang penting, terlebih biasanya dalam perkara perceraian dengan alasan zina para pihak tidak mempunyai bukti yang cukup kuat.

Selain itu faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara perceraian dengan dalil Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Donggala adalah kurangnya pemahaman para penggugat tentang proses perceraian di Peradilan Agama.

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan permasalahan dan pembahasal hasil penelitian tentang Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Donggala, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Donggala yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental serta dihukum
2. Adapun bentuk penyelesaian perkara penyebab perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala yaitu dengan berprinsip dengan asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, Asas sederhana, cepat dan biaya ringan; asas persidangan untuk umum, asas legalitas, asas persamaan serta asas aktif memberi bantuan

#### ***B. Implikasi Penelitian***

Setelah menyimpulkan jawaban permasalahan, penulis memberikan beberapa masukan atau pendapat khususnya mengenai perkawinan dan perceraian, yaitu :

1. Penelitian ini adalah pengamatan yang langsung dilakukan oleh Penulis, sehingga didapatkan beberapa aspek yang dapat dilanjutkan kejenjang penelitian lainnya, di mana perkara perceraian yang diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui jalur diluar hukum selama pihak-pihak yang berperkara masih memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka sehingga dibutuhkan badan atau orang tertentu yang dapat menyelesaikan masalah perceraianya tanpa harus putusya perkawinan untuk itu masih terbuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan yang tidak dapat diteliti dalam tesis ini yaitu yang berkenaan pembinaan rumah tangga atau pensosialisasian UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pasangan yang akan dan sementara melangsungkan hubungannya dapat menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak perlu adanya perceraian.
2. Hendaknya kepada para pasangan suami istri untuk lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, serta selalu berusaha untuk menciptakan hubungan komunikasi yang baikdengan pasangannya;
3. Kepada para Hakim Pengadilan Agama untuk lebih memperdalam pemahamanterhadap berbagai disiplin Ilmu Hukum dan juga beberapa disiplin ilmu lainnya,misalnya disiplin Ilmu Psikologi. Hal ini diperlukan guna menjadikan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim lebih kuat, berbobot, dan berkualitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta. 1998.
- Arif, Gosita, *Victimologi dan KUHP*, Akademika Presindo, Jakarta. 1986.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta, 1993
- Awangga, Surya Putra N, *Desain Proposal Penelitian*, Yogyakarta, Pyramid Publisher, 2007
- Bawengan. GW, *Hukum Pidana dan Teori dan Praktek*, Pordnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Bertens, K, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000
- C, Suryadi, & Handayani Y.S *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Masalah Kesehatan Masyarakat antara Harapan dan Kenyataan*, Makalah, Unika Atmajaya, Jakarta, 1999.
- D, Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2006.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2006
- E.N, Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah Seminar Nasional "Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Yogyakarta. 1996.
- Effendy, Rushdi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, LEPPEN UMI, Makassar. 1986.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1995.
- G, Widiartana. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2009.
- Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung. 1987.



- Ghozali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet. 4, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010
- Hakimi, dkk, *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Isteri dan KEsehatan Perempuan di Jawa Tengah*, Yogyakarta: LPKGM-UGM, Rafika Annisa WCC, 2001
- Hayati, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Rafika Annisa WCC, 2000
- Hayu, Dewita dan Oetari Cintya, *Kekerasan dalam rumah tangga*, LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta. 2007.
- Hoesein, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jilid 1, Cet. 1, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971
- Kartininingrum, T, *Hubungan Antara Tingkat Religiusitas Suami dan Kecenderungan Kekerasan Terhadap Istri*, Skripsi Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Surabaya (Tidak diterbitkan) Surabaya: 2000
- Lianawati, Ester, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Femini*, Cet. 1, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009
- Luhulima, Achie Sudiarto, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan jender Universitas Indonesia, 2000.
- Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. 1, Jakarta: UI Press, 1992
- Moelijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999
- Mukhtar, Kemal, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang. 1995.
- Nur, Rosmala Dan Fadliah, *Tindakan Kekerasan Suami terhadap Isteri di Kota Palu Sulawesi Tengah*, Palu: 2001 (Tidak diterbitkan)
- Philipus, Hadjon M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. 1987.

- Poerwandari, Kristi, *Kekerasan terhadap perempuan (Tinjauan Psikologis Feministik)*, Alumni, Bandung. 2000.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta. 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Pt. Eresco, Bandung. 1967.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung. 1980.
- Puspa, Pramidiya Yan, *Kamus Hukum Indonesia*, Belanda Inggris, Aneka Ilmu, Semarang. 1977.
- R. B. Munti, *Sosialisasi Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* Jakarta: LBH-APIK, 2000
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990
- S, Meiyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1999.
- Sampurna, Budi, *Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan*, Citra Unbara, Bandung. 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1983.
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap*, Bogor. Politeia, 1976.
- Subul As-Salam*, Juz 3, Qairo: Dar Ihya Alturas Alarabi, 1960
- Sukardi, *Metode Penelitian*, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara
- Surakhman, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet. 6, Bandung: Tarsito, 1978
- Suryadi, C & Handayani Y.S, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Masalah Kesehatan Masyarakat antara Harapan dan Kenyataan*, "Makalah", Jakarta: Unika Atmajaya, 1999
- T, Saraswati, *Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan di dalam Masyarakat "Makalah Seminar Kekerasan Seksual Yogyakarta: PPK-UGM dan Ford Foundation, (tidak Diterbitkan)*

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahid, Abdul dan Muh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak-hak Asasi Perempuan)*, Refika Adiat, Bandung. 2001.

Widiartana, G, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009

## B. Internet & CD

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Donggala](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Donggala) diakses tanggal 21 Maret 2013

<http://infoperkara.badilag.net/> (Mahkamah Agung RI) diakses tanggal 07 Juni 2013

<http://pa-donggala.go.id/> diakses tanggal 21 Maret 2013

[http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=140&Itemid=157](http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=157) diakses tanggal 21 Maret 2013

Diqital Bulughul Maram, Pustaka Alhidayah Versi 2.0, 1429 H / 2008 M, Bab Thalaq

## C. Wawancara

<sup>1</sup>Drs. H. Rahmatullah, MH., (Ketua Pengadilan Agama Donggala), “Wawancara” Oleh Penulis pada tanggal 04 Maret 2013 di Ruang Ketua Pengadilan Agama Donggala

<sup>1</sup>Kunti Nur Aini, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Donggala), “Wawancara” Oleh Penulis pada tanggal 04 Maret 2013 di Ruang Kerja Pengadilan Agama Donggala

<sup>1</sup>Mahfudz, SH, (Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Donggala), “Wawancara” Oleh Penulis pada tanggal 04 Maret 2013 di Ruang Adminstrasi Pengadilan Agama Donggala

# PANDUAN WAWANCARA

***JUDUL :***

**“DINAMIKA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN AGAMA DONGGALA”**

1. Berapa jumlah Perkara Perceraian yang:
  - a. Didaftarkan
  - b. Dikabulkan/lanjutan
  - c. Dibatalkan
  - d. Diputuskan
2. Berapa jumlah kasus Perceraian akibat dari KDRT yang:
  - a. Didaftarkan
  - b. Dikabulkan
  - c. Dibatalkan
  - d. diputuskan
3. Dari kasus perceraian yang diselesaikan, berapa yang berkaitan dengan :
  - a. Gugatan dari tahun:
    - 1) 2010
    - 2) 2011
    - 3) 2012
    - 4) 2013
  - b. Permohonan dari tahun:
    - 1) 2010
    - 2) 2011
    - 3) 2012
    - 4) 2013
4. Dari jumlah kasus yang terselesaikan, berapa jumlah kasus yang berkaitan dengan KDRT dari tahun:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

- 1) 2010
- 2) 2011
- 3) 2012
- 4) 2013
5. Kasus-kasus seperti apa yang dianggap paling sulit dan proses penyelesaiannya memerlukan waktu lama ?
6. Seperti apa dinamika penyelesaian perkara perceraian akibat dari KDRT ?
7. Selain dari penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan/putusan dan perdamaian, langkah-langkah apa saja yang diambil dalam proses penyelesaian perkara perceraian ?
8. Apakah semua perkara perceraian itu akibat dari KDRT ?
9. Dalam sejarah penyelesaian perkara perceraian akibat dari KDRT, berapa kasus yang telah terselesaikan dan berapa yang belum terselesaikan ? atau seperti apa ?
10. Apa yang menjadi penyebab utama hingga terjadinya KDRT ?
11. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan masyarakat/para muballigh untuk menanggulangi afek terjadinya KDRT ?